

LAPORAN KINERJA (LKj)



TAHUN
2022

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG

PROVINSI
SUMATERA BARAT



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Dilingkungan Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Pencapaian Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disisi lain, LAKIP ini dapat menjadi cermin pembanding bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama tahun 2022, sekaligus sebagai alat pemacu untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya agar lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun pelaksanaannya.

Padang, Januari 2023

Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan
Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat



ERASUKMA MUNAF, ST,MM

Pembina Utama Muda(IV/c)

NIP. 19720925 199803 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022. Penyusunan LAKIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya Tujuan dan Sasaran, serta Visi dan Misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Visi tersebut yakni sebagai **"Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan"**, yang merupakan bagian dari Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD-P sebesar **Rp. 370.187.484.295,-** dengan Realisasi sebesar **Rp. 350.525.704.049,26,- (94,69%)** yang mempunyai 9 (sembilan) program, 19 (Sembilan Belas) kegiatan pada APBD-P. Target Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah pada Tahun 2021 sebesar Rp. 2.112.503.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.557.442.000,- (73,72%).

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Restribusi	Anggaran	Realisasi	%
1.	Retribusi Pemakaian Laboratorium	562.503.000	602.982.000	107,20
2.	Retribusi Pemakaian Kendaraan	1.550.000.000	954.460.000	61,58
Jumlah		2.112.503.000	1.557.442.000	73,72

Dana APBD SKPD Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar :

**Pagu Dana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat**

No.	Uraian	Rencana	Realisasi	Sisa	%
1.	Belanja Langsung	370.187.484.295,-	350.525.704.049,26,-	19.661.780.246,-	94,69%

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi, pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang pada Tahun 2021 terdapat 9 (Sembilan) program dan 19 Kegiatan serta mempunyai 92 (Sembilan Puluh Dua) Sub Kegiatan. *Out put* dan *out come* dari program-program strategis tersebut mempunyai korelasi/keterkaitan langsung dengan indikator kinerja pemerintah Provinsi.

Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas BMCKTR Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2022	REALIASI TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	Tim Evaluator
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Organisasi	73,60%	-
3.	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Rasio kemantapan jalan	75%	71.39%
4.	Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak	Akses Air Minum Layak	82%	83.78%
5.	Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak	Akses Sanitasi Layak	82%	83.08%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2022	REALIASI TAHUN 2022
6.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	Presentase Bangunan Strategis terbangun	40.22%	6%
		Presentase pentaan bangunan pada kawasan strategis	20%	2.5%
7.	Mewujudkan Penataan Ruang yang baik dan Berkelanjutan	Presentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Provinsi	86%	86%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		
RINGKASAN EKSEKUTIF		
DAFTAR ISI		
DAFTAR GAMBAR		
DAFTAR TABEL		
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Gambaran Organisasi	1
1.1.1	Dasar Pembentukan Organisasi	2
1.1.2	Tugas Pokok Organisasi	2
1.1.3	Struktur Organisasi	18
1.1.4	Sumber Daya Manusia	20
1.2	Aspek Strategis Organisasi	21
1.3	Permasalahan Utama (Strategic Issues) Yang Dihadapi Organisasi	22
1.4	Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2021	24
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	26
2.1	Peran Strategis	26
2.1.1	Tujuan dan Sasaran	26
2.1.2	Strategi dan Arah Kebijakan	27
2.2	Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021	31
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1	Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	40
3.2	Hasil Pengukuran Kinerja	40
3.3	Analisis Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022	41
3.3.1	Sasaran 1: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	41
3.3.2	Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	46
3.3.3	Sasaran 3: Meningkatnya Kemantapan Jalan	50
3.3.4	Sasaran 4: Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak	60
3.3.5	Sasaran 5: Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak	68
3.3.6	Sasaran 6: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	74
3.3.7	Sasaran Mewujudkan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan	84
3.4	Realisasi Anggaran	92
BAB IV	PENUTUP	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas BMCKTR tahun 2021	19
Gambar 1.2	Proporsi Pegawai Dinas BMCKTR berdasarkan kelamin Tahun 2021	20
Gambar 2.1	Dokumen Perjanjian Kinerja Awal Kepala Dinas BMCKTR tahun 2022 (1)	34
Gambar 2.2	Dokumen Perjanjian Kinerja Awal Kepala Dinas BMCKTR tahun 2022 (2)	35
Gambar 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas BMCKTR tahun 2022 (1)	37
Gambar 2.4	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas BMCKTR tahun 2022 (2)	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Berdasarkan Jenis Kelamin	20
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2021 berdasarkan tingkat pendidikan	20
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Berdasarkan pangkat/golongan	21
Tabel 1.4	Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2021	23
Tabel 2.1	Peran Strategis Dinas BMCKTR dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	28
Tabel 2.2	Indikator Kinerja & Target Capaian Dinas BMCKTR sesuai RPJMD 2016-2021	30
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021	32
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Awal Kepala Dinas BMCKTR tahun 2021	33
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas BMCKTR tahun 2021	36
Tabel 3.1	Rekapitulasi Realisasi Indikator Kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat	41
Tabel 3.2	Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis Dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022	41
Tabel 3.3	Pengukuran Target Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengukuran Target Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	43
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2020, 2021 dan 2022	43
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja s/d 2022 Terhadap Renstra	44
Tabel 3.6	Program/Kegiatan Pendukung Capaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	45
Tabel 3.7	Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	46
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	48
Tabel 3.9	Realisasi Kinerja & Capaian Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi tahun 2020, 2021 dan 2022	48
Tabel 3.10	Program/Kegiatan Pendukung Capaian Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	50
Tabel 3.11	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Barat Per Ruas Tahun 2022	51
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Indikator Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	55

Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Rasio Kemantapan Jalan tahun 2020, 2021 dan 2022	56
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Kemantapan Jalan s/d 2022 Terhadap Renstra	57
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Persentase Kemantapan Jalan Dengan Standar Nasional	57
Tabel 3.16	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Capaian Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	59
Tabel 3.17	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022	62
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Indikator Akses Air Minum Layak Layak di Sumatera Barat Tahun 2022	64
Tabel 3.19	Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Rasio Kemantapan Jalan tahun 2020, 2021 dan 2022	65
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja Akses Air Minum Layak s/d 2022 Terhadap Renstra	65
Tabel 3.21	Realiasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Capaian Akses Air Minum Layak	67
Tabel 3.22	Laporan Kemajuan Akses Jamban Provinsi Sumatera Barat s/d Desember 2022	69
Tabel 3.23	Target dan Capaian Indikator Akses Sanitasi Layak di Sumatera Barat Tahun 2022	70
Tabel 3.24	Realisasi Kinerja & Capaian Akses Sanitasi Layak tahun 2020, 2021 & 2022	71
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi Kinerja Akses Sanitasi Layak s/d 2022 Terhadap Renstra	71
Tabel 3.26	Realiasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Capaian Akses Sanitasi Layak	73
Tabel 3.27	Target dan Capaian Indikator Persentase Bangunan Strategis Terbangun di Sumatera Barat Tahun 2022	75
Tabel 3.28	Realisasi Kinerja & Capaian Presentase Bangunan Strategis Terbangun tahun 2020, 2021 dan 2022	76
Tabel 3.29	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Bangunan Strategis Terbangun s/d 2022 Terhadap Renstra	77
Tabel 3.30	Realiasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Capaian Persentase Bangunan Strategis Terbangun	78
Tabel 3.31	Target dan Capaian Indikator Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis di Sumatera Barat Tahun 2022	81
Tabel 3.32	Realisasi Kinerja & Capaian Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis tahun 2020, 2021 dan 2022	81
Tabel 3.33	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis s/d 2022 Terhadap Renstra	82

Tabel 3.34	Realiasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Capaian Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis	83
Tabel 3.35	Daftar Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Provinsi T.A 2022	85
Tabel 3.36	Capaian Kinerja Indikator Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	89
Tabel 3.37	Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan Rencana Tata Ruang tahun 2020, 2021 dan 2022	89
Tabel 3.38	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi s/d 2022 Terhadap Renstra	90
Tabel 3.39	Realiasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Capaian Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	91
Tabel 3.40	Realisasi Anggaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah berupaya mewujudkan tujuan nasional dan daerah. Dalam tataran nasional, pemerintah memiliki visi yaitu terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Sementara sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Barat, pemerintah memiliki visi yaitu Mewujudkan Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan .

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang atau yang selanjutnya disingkat dengan Dinas BMCKTR dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun - 2 - 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas BMCKTR sendiri memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Dilingkungan Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Sebagai perwujudannya perlu disampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah yang ada di suatu wilayah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi

Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016. sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun - 2 - 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Laporan ini memuat analisis kinerja dan keuangan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

Tata cara penyusunan LAKIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur dengan Nomor 50 Tahun 2020 sebelumnya yang bernama Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dengan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat awalnya merupakan bagian dari Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman (Prasjal Tarkim). Setelah Perda Nomor 8 tahun 2016 diterbitkan maka Dinas Prasjal Tarkim dipecah menjadi 2 (dua) dinas yaitu Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan). sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun - 2 - 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan Nomor 87 Tahun 2020 diketahui bahwa Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan dinas daerah tipe B yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah Bidang KePU_an. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang KePU_an.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang KePU_an.
3. Pembinaan dan fasilitasi Bidang KePU_an lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
5. Pelaksanaan tugas di bidang Keciaptakaryaan, Pelaksanaan Jalan serta bidang Penataan Ruang.
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Keciaptakaryaan, Pelaksanaan Jalan serta Bidang Penataan Ruang.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki susunan organisasi dinas dengan fungsinya masing-masing.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis, penyelenggaraan administrasi, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dan penyelenggaraan tugas lain yan diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya, dengan rincian sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Bidang KePU_an;
- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan di Bidang KePU_an
- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas–tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;

- g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di Bidang KePU_an;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas pokok penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketata usahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas, dengan rincian sebagai berikut :

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas;
2. Menyelenggarakan penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan di lingkungan Dinas;
3. Menyelenggarakan pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian;
4. Menyelenggarakan pengelolaan tata kearsipan, urusan kerumahtanggaan Dinas, ketatausahaan dan humas rumah tangga Dinas;
5. Menyelenggarakan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana Dinas;
6. Menyelenggarakan pengelolaan dan penataan barang milik daerah;
7. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Menyelenggarakan pengelolaan data, informasi publik dan dokumentasi berbasis komputerisasi/ web;
9. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ Sub Bagian Program, Data dan Informasi;

Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok melakukan fasilitasi / coordinator menyusun program dan penganggaran insfrastruktur pembangunan serta melakukan pemantauan , evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi penganggaran dan penataan data / informasi publik dilingkungan dinas. Sub Bagian Program, Data dan Informasi memiliki fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Program, Data dan Informasi; dan
2. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan bidang Program, Data dan Informasi di lingkungan Dinas.

➤ ***Sub Bagian Tata Usaha;***

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kearsipan, kepegawaian, urusan rumah tangga, tata laksana organisasi, pengelolaan aset dan penegakan aturan dinas.

Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Usaha; dan
2. Pelaksanaan dan penyusunan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha di lingkungan Dinas.

3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan

Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Teknis dan Leger Jalan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Marga meliputi :

- a. menyelenggarakan program kerja dan pengkajian bahan kebijakan teknis perencanaan teknis dan leger jalan, pembangunan jalan dan jembatan, serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan, Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

- d. menyelenggarakan pembinaan pengelolaan administrasi perencanaan teknis dan leger jalan, pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional, bantuan teknis perencanaan, rekomendasi pemberian izin utilitas pada badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan/pengendalian kegiatan pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi;
- g. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi mengenai perencanaan teknis dan leger jalan, pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- h. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan ke-Bina Marga-an di kabupaten/kota;
- i. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi Bidang ke-Bina Marga-an.
- j. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan perencanaan teknis dan leger, pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ ***Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan***

Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perencanaan Teknis dan Leger Jalan.

Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Teknis dan Leger Jalan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Teknis dan Leger Jalan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Teknis dan Leger Jalan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan teknis&leger jalan;

- b. melaksanakan penyusunan program-program, mengolah, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan kegiatan pemutakhiran database jalan, drainase dan penahan badan jalan;
- c. melaksanakan survey pendataan dan analisa dan evaluasi tentang status fungsi peta jalan serta jembatan;
- d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan ke-Bina Marga-an;
- e. melaksanakan kebijakan di Bidang Perencanaan Teknis dan Leger Jalan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan/pengendalian kegiatan pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi;
- g. melaksanakan bantuan teknis perencanaan;
- h. melaksanakan pemberian rekomendasi teknis terhadap izin pemasangan fasilitas umum (utilitas) pada badan jalan dan manfaat badan jalan jembatan;
- i. melaksanakan pengelolaan data, pelaporan dan evaluasi Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ ***Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan***

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembangunan jalan dan jembatan;
- b. melaksanakan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan peningkatan sarana jalan dan jembatan;
- c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan ke-Bina Marga-an;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;

- e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja konstruksi prasarana dan sarana jalan dan jembatan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan; melakukan survey, analisis struktur jalan dan jembatan, penelitian, melakukan rencana dan gambar mengenai geometri jalan, jembatan, dinding penahan dan drainase;
- h. melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis dan estimasi biaya terhadap pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, drainase dan dinding penahan jalan;
- i. melaksanakan pengelolaan data, pelaporan dan evaluasi pada Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ ***Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan***

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pemeliharaan Jalan & Jembatan meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pemeliharaan jalan & jembatan;
- b. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan ke-Bina Marga-an;
- c. melaksanakan kebijakan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan pengelolaan data pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan/pengendalian pemeliharaan dan jembatan;

- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemasangan fasilitas umum (utilitas) pada badan jalan dan daerah milik jalan;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pemeliharaan jalan dan jembatan;
- i. melaksanakan survey, analisis struktur jalan dan jembatan, penelitian, melakukan rencana pemeliharaan jalan dan jembatan;
- j. melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis dan estimasi biaya terhadap pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan dinding penahan jalan serta daerah milik jalan;
- k. melaksanakan pelaporan dan evaluasi Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas, Penyehatan Lingkungan serta Air Minum dan Limbah.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyehatan Lingkungan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Air Minum dan Limbah.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Cipta Karya meliputi :

- a. menyelenggarakan program kerja dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Cipta Karya;
- b. menyelenggarakan fasilitasi keciptakaryaan;
- c. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan keciptakaryaan;
- d. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis provinsi;
- e. menyelenggarakan fasilitasi dan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;

- f. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;
- g. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan keciptakaryaan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ ***Seksi Penyehatan Lingkungan***

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Penyehatan Lingkungan.

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Penyehatan Lingkungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Penyehatan Lingkungan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyehatan Lingkungan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Penyehatan Lingkungan meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyehatan lingkungan;
- b. melaksanakan pengelolaan data penyehatan lingkungan;
- c. melaksanakan fasilitasi terhadap kabupaten/kota dalam upaya pengembangan sistem sanitasi;
- d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi Program Penyehatan Lingkungan;
- e. melaksanakan pengembangan infrastruktur Seksi Penyehatan Lingkungan;
- f. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan infrastruktur penyehatan lingkungan pada permukiman di kawasan strategis provinsi;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur Seksi Penyehatan Lingkungan;
- h. menyusun dan menyiapkan laporan Seksi Penyehatan Lingkungan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyehatan lingkungan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ ***Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Negara***

Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas.

Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan pembangunan gedung dan rumah dinas;
- b. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan gedung dan rumah dinas;
- c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan gedung dan rumah dinas;
- d. melaksanakan penyelenggaraan pembangunan gedung dan rumah dinas;
- e. melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi.
- f. melaksanakan fasilitasi dan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
- g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pembangunan gedung dan rumah dinas;
- h. melaksanakan pengembangan jejaring kemitraan dalam Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas;
- j. melaksanakan bantuan teknis terhadap Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan gedung dan rumah dinas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ ***Seksi Air Minum dan Limbah***

Seksi Air Minum dan Limbah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Air Minum dan Limbah.

Seksi Air Minum dan Limbah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Air Minum dan Limbah;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Air Minum dan Limbah; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Air Minum dan Limbah.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Air Minum dan Limbah meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis air minum dan limbah hasil pengelolaan air minum;
- b. melaksanakan pengelolaan data pada seksi air minum dan limbah hasil pengolahan air minum;
- c. melaksanakan fasilitasi terhadap kabupaten/kota dalam upaya pengembangan sistem pada seksi air minum dan limbah hasil pengolahan air minum;
- d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi program seksi Air Minum dan Limbah hasil pengolahan air minum;
- e. melaksanakan pengembangan infrastruktur seksi air minum dan air limbah hasil pengolahan air minum;
- f. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan infrastruktur air minum pada permukiman di kawasan strategis provinsi;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur air minum dan limbah hasil pengolahan air minum;
- h. menyusun dan menyiapkan laporan seksi air minum dan limbah hasil pengolahan air minum; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Perencanaan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang Pengawasan Penataan Ruang.

Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Penataan Ruang;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Penataan Ruang; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Penataan Ruang.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Penataan Ruang meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan penetapan Perdanya;
- b. menyelenggarakan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Peraturan Zonasi serta penetapan Perdanya;
- c. menyelenggarakan penyusunan program dan kegiatan Bidang Penataan Ruang;
- d. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penataan ruang antar kabupaten/kota;
- e. menyelenggarakan pengendalian perencanaan penataan ruang, pembinaan penataan ruang dan pengawasan penataan ruang; dan
- f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan perencanaan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, dan pengawasan penataan ruang;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ *Seksi Perencanaan*

Seksi Perencanaan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perencanaan Penataan Ruang.

Seksi Perencanaan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Tata Ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Penataan Ruang; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Penataan Ruang.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Perencanaan Penataan Ruang meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana tata ruang;
- b. melaksanakan penyusunan serta sinkronisasi program pemanfaatan ruang antar daerah;
- c. melaksanakan penyusunan program pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

- d. melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi;
- e. melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP);
- f. melaksanakan penyusunan perangkat insentif dan disinsentif tingkat Provinsi;
- g. melaksanakan integrasi RTRW dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
- h. melaksanakan penyediaan pusat data dan informasi penataan ruang yang terdiri dari perda, dokumen Penataan ruang dan data spasial;
- i. melaksanakan pelaporan dan evaluasi di bidang Perencanaan penataan Ruang;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ ***Seksi Pembinaan***

Seksi Pembinaan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pembinaan Penataan Ruang.

Seksi Pembinaan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Penataan Ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Penataan Ruang; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Penataan Ruang.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pembinaan Penataan Ruang meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan program & kegiatan Seksi Pembinaan Penataan Ruang;
- b. melaksanakan sosialisasi kebijakan bidang penataan ruang (peraturan perundang-undangan dan pedoman penataan ruang) ;
- c. melaksanakan pemberian advokasi, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan penataan ruang kepada kabupaten/kota ;
- d. melaksanakan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada ;
- e. melaksanakan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat ;
- f. melaksanakan pemberian izin pemanfaatan ruang tingkat Provinsi ;
- g. melaksanakan pembinaan pengembangan system informasi dan komunikasi penataan ruang kepada kabupaten/kota ;
- h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi seksi Pembinaan Penataan Ruang ;

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ **Seksi Pengawasan**

Seksi Pengawasan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengawasan Penataan Ruang.

Seksi Pengawasan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengawasan Penataan Ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengawasan Penataan Ruang; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan Penataan Ruang.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pengawasan Penataan Ruang meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan seksi pengawasan penataan ruang
- b. melaksanakan koordinasi dan kebijakan pengawasan penataan ruang;
- c. melaksanakan monitoring kinerja pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang di kabupaten/kota;
- d. melaksanakan monitoring pemenuhan penyediaan peta analog dan peta digital rencana tata ruang di kabupaten/kota;
- e. melaksanakan monitoring pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau sebesar 20 % dari luasan kawasan perkotaan di kabupaten/kota.
- f. melaksanakan pemberian sanksi pelanggaran penataan ruang tingkat provinsi;
- g. melaksanakan operasional penyidik pegawai negeri sipil (ppns) bidang penataan ruang;
- h. melaksanakan evaluasi pemanfaatan ruang tingkat provinsi;
- i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi terkait indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di kabupaten/kota;
- j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi seksi pengawasan penataan ruang;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. UPTD Laboratorium dan Bahan Konstruksi

Susunan organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi terdiri atas :

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha

3. Seksi Pengujian Mutu Bahan
4. Seksi Pengujian Mutu Konstruksi
5. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengujian mutu bahan/konstruksi.

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional pengujian bahan/mutu konstruksi.
- b. Pelaksanaan pengelolaan, pengaturan, pemanfaatan, pemakaian alat-alat laboratorium untuk pengujian bahan/mutu konstruksi.
- c. Pelaksanaan operasional layanan pengujian pada masyarakat dan pihak ketiga sesuai dengan bidang pengujian bahan/mutu konstruksi.
- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi untuk PAD Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- e. Pelaksanaan operasional tugas kedinasan sesuai dengan bidang pengujian bahan/mutu konstruksi.
- f. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan UPTD.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. UPTD P2BG

Susunan organisasi UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung terdiri dari :

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
4. Seksi Layanan Data dan Informasi
5. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.

UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.
- c. Pelaksanaan operasional pelayanan pada masyarakat bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.
- d. Pelaksanaan teknis administrasi ketatausahaan UPTD.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. UPTD Workshop dan Peralatan

Susunan organisasi UPTD Workshop dan Peralatan terdiri :

- 1. Kepala UPTD
- 2. Sub Bagian Tata Usaha
- 3. Seksi Peralatan dan Layanan Gangguan
- 4. Seksi Workshop dan Perbekalan
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Workshop dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang penyiapan peralatan, bahan jalan/jembatan, perbengkelan, layanan gangguan dan pembinaan peralatan.

UPTD Workshop dan Peralatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan, pengawasan, pengaturan, pemanfaatan dan pemakaian asset kekayaan daerah berupa peralatan penunjang untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.
- b. Pelaksanaan pemeliharaan dan operasional peralatan.
- c. Pelaksanaan pekerjaan layanan gangguan pada jalan/jembatan akibat bencana alam.
- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi atas sewa peralatan untuk PAD.
- e. Pelaksanaan teknis standard administrasi dan operasional peralatan.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI

Susunan organisasi UPTD Jalan Jembatan Wilayah I-VI terdiri dari :

- 1. Kepala UPTD
- 2. Sub Bagian Tata Usaha
- 3. Seksi Jalan dan Jembatan I

4. Seksi Jalan dan Jembatan II
5. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program/anggaran kegiatan, pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin dan berkala serta pengendalian/evaluasi hasil pemeliharaan teknis jalan dan jembatan.

UPTD Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan program kegiatan dan anggaran pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan
- b. Penyelenggaraan penyusunan kerangka acuan kerja, estimasi biaya dan penyiapan dokumen-dokumen teknis pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan.
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan.
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi dengan kabupaten/kota atas pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan.
- e. Pemberian bantuan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan pada masyarakat atau kelompok swadaya masyarakat yang membutuhkan.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

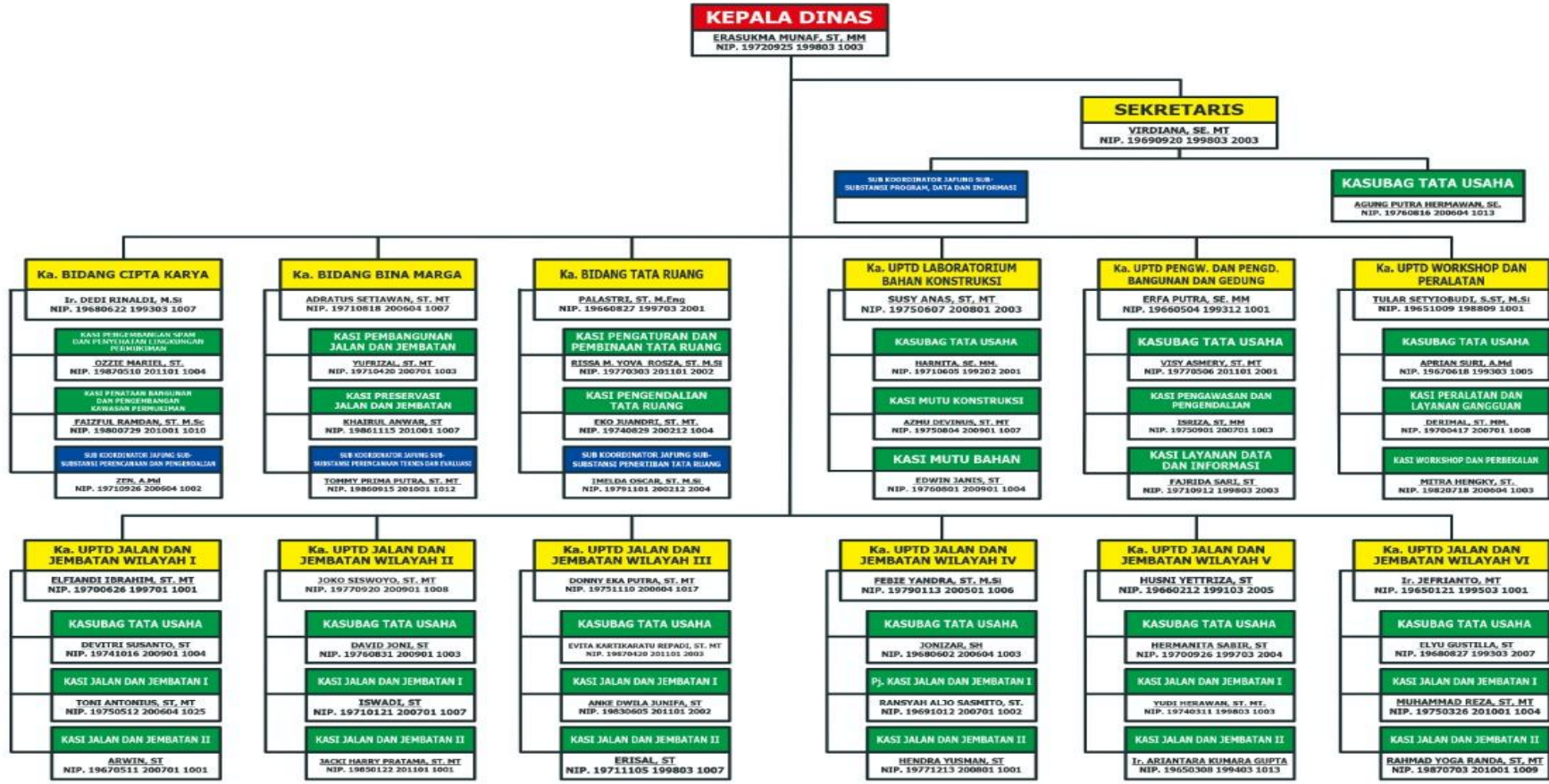
Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2022 ditampilkan pada *Gambar 1.1*. Dari struktur organisasi dapat dijelaskan bahwa formasi tenaga struktural pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang pada Tahun 2022 terdiri dari :

1. Kepala Dinas : Eselon II (1 orang)
2. Sekretaris : Eselon III (1 orang)
3. Kepala Bidang : Eselon III (3 orang)
4. Kepala UPTD : Eselon III (9 orang)
5. Kepala Seksi : Eselon IV (27 orang)
6. Kasubag : Eselon IV (11 orang)

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas BMCKTR tahun 2021

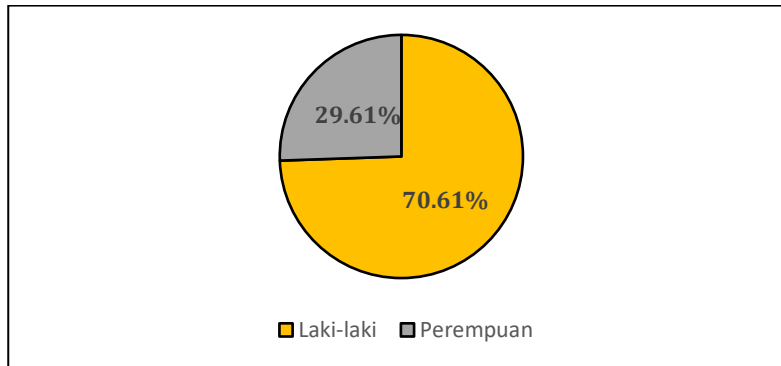
1.1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data akhir Tahun 2022 sebanyak 313 (Tiga Ratus Tiga Belas) orang Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan jenis kelamin pemetaan pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumbar ditampilkan pada *tabel 1.1*.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
Laki-laki	221 orang	70.61%
Perempuan	92 orang	29.39%

Sumber : Subbag TU Dinas BMCKTR



Gambar 1.2 Proporsi Pegawai Dinas BMCKTR berdasarkan kelamin Tahun 2022

Pemetaan pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya ditampilkan pada *tabel 1.2*.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
SD	2	-	2
SLTP Sederajat	7	-	7
SLTA Sederajat	78	10	88
DIII	23	10	33
DIV	-	-	-
S1	78	51	129
S2	33	21	54
Jumlah	221	92	313

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas BMCKTR

Sedangkan, pemetaan pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pangkat/golongan ditampilkan pada *tabel 1.3*

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Berdasarkan pangkat/golongan

Golongan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
1A	-	-	-
1b	-	-	-
1c	-	-	-
1d	3	-	3
2a	1	-	1
2b	12	1	13
2c	17	5	22
2d	64	8	72
3a	22	16	38
3b	45	20	65
3c	19	20	39
3d	22	15	37
4a	12	6	18
4b	3	1	4
4c	1	-	1
4d	-	-	-
4e	-	-	-

Sumber : Subbag TU Dinas BMCKTR

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat yang kemudian berkontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat terutama melalui pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, air minum, air limbah, pembangunan gedung atau bangunan negara serta penataan ruang. Infrastruktur Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

Pembangunan jalan dan jembatan dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Hal tersebut dilakukan dengan cara pembangunan dan peningkatan pada jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir, meningkatkan prasarana perhubungan menuju destinasi wisata dan pelabuhan, serta meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan. Dengan adanya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing wilayah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Pemeliharaan

dan rehabilitasi ruas jalan yang ada juga diperlukan untuk mempertahankan kondisi kemantapan jalan yang ada.

Disamping itu, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat juga memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan akan akses air minum dan sanitasi yang layak di Provinsi Sumatera Barat. Peran strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang lainnya adalah pembangunan gedung negara, shelter dan bangunan lainnya dalam rangka rekonstruksi bangunan yang ada di Sumatera Barat. Pembangunan bangunan strategis yang dilakukan pada Tahun 2022 yaitu Lanjutan Pembangunan Main Stadium Sumatera Barat dan Guest House Gubernur.

Penataan Ruang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai daya dukung lingkungan dan berkelanjutan. Pada Tahun 2022, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat melakukan penyusunan Rencana Tata Ruang pada Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP Mandeh) dan RTR KSP Pasopalapa. Selain itu Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat juga melakukan penyusunan database ke PUan dan Tata Ruang Provinsi, Kabupaten dan Kota serta beberapa rencana tata ruang lainnya.

Adapun program-program Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan misi Gubernur yaitu Mewujudkan Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan. Dengan demikian pembangunan infrastruktur yang dilakukan Dinas BMCKTR dapat mengurangi kesenjangan antar kawasan, meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan pembangunan.

1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issues) yang dihadapi Organisasi

Pembangunan Sumatera Barat telah mengalami kemajuan dan keberhasilan selama beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang harus ditangani segera melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan. Di bidang infrastruktur, Sumatera Barat menghadapi tantangan untuk terus berbenah menuju infrastruktur yang andal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah salah satu OPD yang terlibat langsung dalam permasalahan infrastruktur yang ada di Sumatera Barat.

Permasalahan utama terkait infrastruktur salah satunya adalah upaya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah masih terkendala. Penyebabnya adalah (1) masih

terdapat jalan yang belum terhubung antar wilayah dan terisolir karena faktor pembebasan lahan dan keterbatasan anggaran (2) kemantapan jalan provinsi tahun 2022 sebesar 71,68 % terjadi penurunan capaian jalan mantap dikarenakan perubahan SK Jalan tahun 2022.

Disamping itu, upaya pemenuhan kebutuhan dasar berupa akses air minum dan sanitasi layak juga masih mengalami berbagai kendala, antara lain (1) masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat (2) Keterbatasan ketersediaan sumber air baku di kabupaten/kota. (3) kesulitan penyediaan lahan karena terkendala pembebasannya sesuai dengan kriteria pembangunan infrastruktur dan (4) Terbatasnya ketersediaan dana pembangunan.

Hal serupa, dibidang Penataan Ruang terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian, yaitu (1) masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan dan belum terbangunnya kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan terutama pemanfaatan ruang (2) rendahnya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang, terbatasnya pedoman acuan pemanfaatan ruang dan upaya memasyarakatkannya.

1.4 Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2021

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2021, telah dilakukan tindak lanjut melalui perbaikan kinerja selama Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.4 Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2021

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
A.	Perencanaan Kinerja	
1.	Tujuan dan Sasaran Jangka menengah OPD seharusnya memuat Indikator Sasaran Strategis yang berorientasi <i>outcome</i> (berorientasi hasil).	Indikator sasaran strategis pada Dinas BMCKTR telah berorientasi <i>outcome</i> pada capaian kinerja tiap tahunnya yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam Lima tahun mendatang.
2.	Meningkatkan perencanaan kinerja yang selaras antara perencanaan jangka Panjang/menengah dan perencanaan tahunan.	Kinerja perencanaan OPD sudah selaras dengan RPJP, RPJMD dan perencanaan tahunan dimanakebijakan program dan permasalahan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab mendasar isu strategis pembangun infrastruktur dasar dibidang pekerjaan umum.

3.	Meningkatkan dan mempertahankan kualitas perencanaan kinerja untuk mencapai sasaran strategis yang akan dicapai.	Meningkatkan kualitas perencanaan dengan baik sehingga perencanaan tersebut dapat diukur dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta memberikan pembinaan terhadap perencanaan seperti sosialisasi.
4.	Meningkatkan pelaksanaan monitoring pencapaian target jangka menengah dan direviu secara berkala sehingga menunjukkan kondisi yang lebih baik dan relevan dengan kondisi saat ini.	Meningkatkan capaian target jangka menengah telah dilakukan beberapa reviu terhadap indikator kinerja.
5.	Rencana Aksi dimonitoring dan dipantau agar dapat mengendalikan pelaksanaan pencapaian target kinerja.	Monitoring terhadap Renaksi sudah dimanfaatkan pada penyusunan anggaran dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja.
B.	Pengukuran Kinerja	
1.	Target kinerja yang diperjanjikan seharusnya digunakan untuk menyimpulkan keberhasilan dan kegagalan sebagai dasar memilih dan memilah yang berkinerja dengan yang kurang berkinerja, serta dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang dijabarkan menjadi target kinerja eselon III dan IV.	Hasil Pengukuran kinerja diukur melalui pemberian TPP secara penuh bagi pegawai yang berkinerja dan pemberian <i>punishment</i> berupa pemotongan terhadap TPP bagi pegawai yang tidak berkinerja.
2.	Meningkatnya pengukuran kinerja secara berjenjang tidak hanya sampai eselon IV namun dapat dimulai dari staf, manajerial sampai kepada pemimpin tertinggi dan tingkat instansi yang dikembangkan menggunakan bantuan teknologi informasi.	Salah satu cara untuk mengukur kinerja kepada ASN menggunakan teknologi dan informasi adalah seperti penggunaan Abon dan Ekin.
C.	Pelaporan Kinerja	
1.	Agar Informasi kinerja pada akuntabilitas kinerja dijadikan pedoman dalam perbaikan perencanaan yang berpengaruh untuk peningkatan kinerja organisasi selanjutnya.	Informasi kinerja pada akuntabilitas kinerja telah dijadikan pedoman perbaikan. Seperti mengikuti aturan – aturan yang telah ditetapkan, serta ditayangkan melalui web dinas.
2.	Pemanfaatan informasi kinerja digunakan untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan dalam artian pemanfaatan informasi kinerja belum menyimpulkan keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan secara terukur.	Pemanfaatan informasi kinerja telah menyajikan tingkat keberhasilan dan kegagalan program kegiatan.
D.	Evaluasi Internal	
1.	Evaluasi terhadap pencapaian kinerja harus	Evaluasi terhadap pencapaian kinerja telah

	dilaksanakan secara berkala dan menetapkan secara formal pihak – pihak yang bertanggung jawab, batas waktu rekomendasi dan tindak lanjut yang diambil terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.	dilakukan secara berkala melalui laporan Realisasi Rencana Aksi dalam rangka pengendalian kinerja.
2.	Agar evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan mempedomani pedoman/juklak yang telah ditetapkan hasil evaluasi terdokumentasi dengan baik sehingga jelas tindak lanjut yang diambil untuk mencapai target kinerja.	Evaluasi akuntabilitas kinerja telah menjadi pedoman terhadap hasil evaluasi terdokumentasi dengan baik sehingga jelas Tindakan yang akan dirangkum dalam Realisasi Rencana Aksi.
3.	Agar hasil evaluasi dimanfaatkan perbaikan kualitas perencanaan dan peningkatan kinerja organisasi.	Hasil evaluasi dilakukan telah dilakukan perbaikan perencanaan dengan melakukan Realisasi rencana aksi serta dengan meningkatkan kualitas organisasi melalui pelatihan dan sosialisasi.
E.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	
	Memprioritaskan pencapaian kinerja 2 (Dua) indikator kinerja sasaran yang mengalami penurunan yaitu: indikator kinerja sasaran meningkatnya cakupan sanitasi dan indikator kinerja sasaran meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang.	Pencapaian kinerja telah melakukan evaluasi terhadap 2 (Dua) sasaran kinerja yang terjadi penurunan maka dari itu untuk kedepan perencanaan harus dapat diukur dan dipertanggung jawabkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Peran Strategis

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Sumatera Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan”**.

Sejalan dengan pencapaian visi tersebut, misi Gubernur Sumatera Barat adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayas saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan social kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS ABK;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan insfrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintah pelayanan public yang bersih, akuntabel serta berkualitas;

Peran strategis di dalam dokumen awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dinyatakan bahwa Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan OPD yang memiliki peran strategis dan tanggungjawab untuk mendukung pencapaian misi 6 Gubernur Sumatera Barat seperti ditampilkan pada tabel berikut.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan tujuan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas insfrastruktur jalan
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insfrastruktur Pelayanan Dasar dan Bangunan Gedung Strategis

4. Meningkatkan penyelenggaraan Penataan Ruang yang baik dan berkelanjutan

Adapun sasaran yang perlu dicapai demi tercapainya tujuan tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kinerja organisasi (tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel).
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah terkait konektivitas-aksesibilitas wilayah.
3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah terkait penyediaan sarana prasarana umum serta pelayanan dasar masyarakat.
4. Mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan.

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan strategi dan kebijakan sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Peran Strategis Dinas BMCKTR dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan					
MISI 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan					
Tujuan	Sasaran	Strategi		Kebijakan	
Tewujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Terintegrasi	1	Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	1	Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi
				2	Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan dan jembatan Provinsi
		2	Percepatan pengembangan Infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan publik pada sektor strategis	3	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur jalan baru dan jalan lama termasuk lintas pantai barat sumatera barat, sesuai master plan yang telah ada dan interkoneksi dan koneksi antar daerah
		3	Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis nasional	4	Meningkatnya dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis nasional
	Meningkatkan infrastruktur	1	Melaksanakan pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Gedung Strategis dan Penataan Bangunan	1	Pembangunan gedung untuk kepentingan strategis

	pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian				
				2	Penataan bangunan dan lingkungan
				3	Pembangunan SPAM Regional
				4	Pembangunan dan pengelolaan TPA Regional
				5	Pembangunan Drainase primer
				6	Pembangunan IPLT Regional
	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	1	Tersusunnya Rencana Tata Ruang yang berkualitas	1	Penyusunan RTR Provinsi dan fasilitasi penyusunan RRTR Kab/Kota
				2	Pembinaan perencanaan tata ruang
		2	Terlaksananya sinkronisasi rencana pembangunan dengan program penataan ruang	1	Pengendalian pemanfaatan ruang
				2	Penyusunan regulasi RTR tingkat provinsi (Perda, Pergub)
				3	Penyebaran informasi perencanaan tata ruang
				4	Peningkatan pengelolaan penggunaan tanah yang sesuai dengan RTRW

Sumber : RPJMD Tahun 2021-2026

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
2	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi	73.53%	73.60%	73.70%	73.80%	73.90%	74.00%	74.00%
3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	73.92%	75%	77%	79%	81%	82%	82%
4	Akses Air Minum layak	80.04%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
5	Akses Sanitasi Layak	80.04%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
6	Persentase bangunan strategis terbangun	38.05%	40.22%	55.55%	66.67%	83.33%	100%	100%
7	Persentase penataan bangunan pada kawasan strategis	NA	20%	40%	60%	80%	100%	100%
8	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Provinsi	84%	86%	87%	88%	89%	90%	90%

Sumber : Rencana Startegis 2021 - 2026

2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat serta Isu-Isu Strategis, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan di Bidang KePU_an lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai. Dalam hal ini Visi Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah **“Mewujudkan Sumatera Barat madina yang unggul dan berkembang”**.

Infrastruktur yang **handal** dapat diartikan sebagai tingkat kondisi ketersediaan prasarana jalan dan jembatan yang berkualitas, menghubungkan antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat dan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan Gubernur yaitu meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Dengan meningkatnya konektivitas antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat melalui prasarana jalan yang handal, maka diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, infrastruktur yang dimaksud juga mencakup aspek Keciptakaryaan yang berkualitas yang dapat diterjemahkan melalui penataan bangunan yang kokoh dan sesuai dengan fungsinya, cakupan pelayanan air minum yang layak, dan peningkatan pelayanan sanitasi sehingga menghasilkan lingkungan yang nyaman dan asri. Adapun Penataan Ruang yang berkelanjutan dalam hal ini adalah tersedianya penataan ruang yang efisien, berkelanjutan dan konsisten sehingga dapat dijadikan acuan dan rujukan dalam kegiatan pembangunan guna terciptanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antar aspek-aspek pembangunan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan.

Perencanaan Kinerja Dinas BMCKTR pada dasarnya mengacu pada dokumen RPJMD (2021-2026) dan visi misi Kepala Dinas yang diturunkan dari Visi-Misi Gubernur. Adapun Perencanaan Kinerja Dinas BMCKTR Tahun 2022 ditunjukkan.

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Internal Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	73,60%
3	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	75,00%
4	Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak	Akses Air Minum Layak	82,00%
5	Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak	Akses Sanitasi Layak	82,00%
6	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	1 Presentase Bangunan Strategis terbangun	42,00%
		2 Presentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis	20,00%
7	Mewujudkan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan	Presentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Provinsi	86,00%

Perencanaan Kinerja berisikan target dan indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yang ingin dicapai pada tahun 2022. Berdasarkan perencanaan kinerja tersebut maka dibuat Perjanjian Kinerja Kepala Dinas (Eselon II) sebagai bentuk komitmen antara Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan Gubernur Sumatera Barat selaku Kepala Daerah. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas (Eselon II) mencakup semua program kegiatan yang ada pada dinas untuk mewujudkan target kinerja yang direncanakan pada tahun 2022. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang pada awal Tahun 2022.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Awal Kepala Dinas BMCKTR tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
2	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	73.60 %
3	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	75%
4	Meningkatnya cakupan air minum layak	Akses Air Minum Layak	82%
5	Meningkatnya cakupan sanitasi layak	Akses Sanitasi Layak	82%
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung strategis	(1) Persentase bangunan strategis terbangun (2) Persentase Penataan bangunan pada Kawasan Strategis	40.22% 20%
7	Mewujudkan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Provinsi	86%

ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN

No	Program	Anggaran	Keterangan
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	39.950.789.638	APBD
II	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.834.331.927	APBD
III	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	318.855.760	APBD
IV	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	175.638.750	APBD
V	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Drainase	2.592.370.696	APBD
VI	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1.213.020.592	APBD
VII	Penataan Bangunan Gedung	21.497.979.584	APBD
VIII	Penyelenggaraan Jalan	268.496.479.500	APBD/APBN
IX	Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.102.268.960	APBD
Jumlah		339.181.735.407	



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp.(0751) 7051700-7051756-7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang
<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email:bmcktr@sumbarprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERASUKMA MUNAF, ST, MM

Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MAHYELDI

Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Gubernur Sumatera Barat

MAHYELDI

Padang, Januari 2022

PIHAK PERTAMA,

ERASUKMA MUNAF, ST, MM
NIP. 19720925 199803 1 003

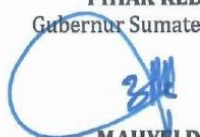
Gambar 2.1 Dokumen Perjanjian Kinerja Awal Kepala Dinas BMCKTR tahun 2022 (1)


PERJANJIAN KINERJA

Nama Perangkat Daerah : Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang
Tahun : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	BB
2	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	73.60%
3	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Rasio kemantapan jalan	75%
4	Meningkatnya cakupan air minum layak	Akses air minum layak	82%
5	Meningkatnya cakupan sanitasi layak	Akses sanitasi layak	82%
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung strategis	(1) Persentase bangunan strategis terbangun (2) Persentase penataan bangunan pada kawasan strategis	40.22% 20%
7	Mewujudkan Penataan Ruang yang baik dan berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Provinsi	86%

No	Program	Anggaran	Keterangan
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	39.950.789.638	
II	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.834.331.927	
III	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	318.855.760	
IV	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	175.638.750	
V	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Drainase	2.592.370.696	
VI	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1.213.020.592	
VII	Penataan Bangunan Gedung	21.497.979.584	
VIII	Penyelenggaraan Jalan	268.496.479.500	
IX	Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.102.268.960	
Jumlah		339.181.735.407	

PIHAK KEDUA,
Gubernur Sumatera Barat

MAHYELDI

Padang, Januari 2022
PIHAK PERTAMA,

ERASUKMA MUNAF, ST.MM
NIP. 19720925 199803 1 003

Gambar 2.2 Dokumen Perjanjian Kinerja Awal Kepala Dinas BMCKTR tahun 2022 (2)

Sasaran Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mengalami revisi cascading terkait sasaran dan tujuan Kepala Dinas (Eselon II), disebabkan adanya perubahan nomenklatur Dinas Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yang sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang tersebut sudah dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas BMCKTR tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
2	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	73.60 %
3	Meningkatnya kemantapan jalan	Rasio Kemantapan Jalan	75%
4	Meningkatnya cakupan air minum layak	Akses Air Minum Layak	82%
5	Meningkatnya cakupan sanitasi layak	Akses Sanitasi Layak	82%
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung strategis	(1) Persentase bangunan strategis terbangun (2) Persentase Penataan bangunan pada Kawasan Strategis	40.22% 20%
7	Mewujudkan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Provinsi	86%

ANGGARAN PERUBAHAN

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Propinsi	41.073.846.990,00	APBD
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.660.337.809,00	APBD
3	Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	718.855.760,00	APBD
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	357.743.700,00	APBD
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.447.874.640,00	APBD
6	Program Penataan Bangunan Gedung	46.996.074.573,00	APBD
7	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1.604.917.554,00	APBD
8	Program Penyelenggaraan Jalan	272.058.925.993,00	APBD/ APBN
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.268.907.276,00	APBD
	JUMLAH	370.187.484.295,00	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp. (0751) 7051700, 7051756, 7051765 Fax. (0751) 7051783
http://bmcktr.sumbarprov.go.id/ - email : bmcktr@sumbarprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERASUKMA MUNAF, ST.MM

Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MAHYELDI

Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Gubernur Sumatera Barat

MAHYELDI

Padang, Oktober 2022
PIHAK PERTAMA,

ERASUKMA MUNAF, ST.MM
NIP. 19720925 199803 1 003

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas BMCKTR tahun 2022 (1)


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Nama Perangkat Daerah : DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Tahun : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
2	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	73.60 %
3	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	75%
4	Meningkatnya cakupan air minum layak	Akses Air Minum Layak	82%
5	Meningkatnya cakupan sanitasi layak	Akses Sanitasi Layak	82%
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung strategis	(1) Persentase bangunan strategis terbangun (2) Persentase Penataan bangunan pada Kawasan Strategis	40.22% 20%
7	Mewujudkan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Provinsi	86%

No	Program	Anggaran	Keterangan
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	41.073.846.990,-	
II	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.660.337.809,-	
III	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	718.855.760,-	
IV	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	357.743.700,-	
V	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Drainase	2.447.874.640,-	
VI	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1.604.917.554,-	
VII	Penataan Bangunan Gedung	46.996.074.573,-	
VIII	Penyelenggaraan Jalan	272.058.925.993,-	
IX	Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.268.907.276,-	
Jumlah		370.187.484.295,-	

PIHAK KEDUA,
Gubernur Sumatera Barat


MAHYELDI

Padang, Oktober 2022
PIHAK PERTAMA,


ERASUKMA MUNAF, ST.MM
NIP. 19720925 199803 1 003

Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas BMCKTR tahun 2022 (2)

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas (Eselon II) dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya tata kelola organisasi

Adapun tata kelola organisasi Dinas BMCKTR mencakup kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi, kualitas pelayanan internal organisasi, kualitas penatausahaan keuangan, dan pengawasan internal organisasi.

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan

Salah satu indikator dalam meningkatnya kualitas dan kuantitas wilayah adalah meningkatnya kemantapan jalan. Kemantapan jalan merupakan definisi dalam penanganan jalan yang menyatakan kualitas fisik dan layanan jalan yang dianggap cukup untuk memenuhi syarat minimal bahwa suatu ruas jalan dapat dioperasikan dalam menjalankan fungsinya secara optimal.

3. Meningkatnya cakupan air minum

Meningkatkan penyediaan layanan air minum di Provinsi Sumatera Barat.

4. Meningkatnya cakupan sanitasi

Meningkatkan penyediaan layanan sanitasi di Provinsi Sumatera Barat.

5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung strategis

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan gedung strategis diupayakan menetapkan kebijakan yang harus ditaati untuk menentukan pembangunan gedung serta pada tahap penataan bangunan dan lingkungan diharapkan perencanaan pembangunan gedung sesuai dengan kawasan strategis yang telah arahkan sehingga pembangunan gedung dapat dilaksanakan secara optimal.

6. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang. Tercapainya kinerja penataan ruang yang tinggi seperti yang diatur dalam UU No 9 Tahun 2015 dan UU No. 26 Tahun 2007.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target indikator kinerja sasaran strategis pada tahun 2022. Untuk menghitung besaran persentase capaian kinerja, secara matematis ditulis sebagai berikut :

a.
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \quad (\text{realisasi yang } \mathbf{besar} \text{ menunjukkan } \mathbf{kinerja \text{ baik}})$$

Artinya : Semakin besar % capaian kinerja, maka semakin baik kinerja suatu indikator , demikian sebaliknya.

b.
$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \quad (\text{realisasi yang } \mathbf{besar} \text{ menunjukkan } \mathbf{kinerja \text{ tidak baik}})$$

Artinya : Semakin besar % capaian kinerja, maka semakin buruk/tidak baik kinerja suatu indikator , demikian sebaliknya.

Untuk Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat metode pengukuran capaian kinerja untuk semua indikator kinerja menggunakan metode yang **(a)**.

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat serta menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalannya. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) pada tahun 2022, ada 6 sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Realisasi Indikator Kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	Tim evaluator
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	73.60%	90,32%
3.	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	75 %	71.40%
4.	Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak	Akses Air Minum Layak	82 %	83.78%
5.	Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak	Akses Sanitasi layak	82 %	83.08%
6.	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	1 Presentase Bangunan Strategis Terbangun	40.20%	6 %
		2 Presentase Penataan Bangunan Pada Kawasan Strategis	20%	2.5%
7.	Mewujudkan Penataan Ruang Yang Baik Dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan Dengan Program RTRW Provinsi	86,00 %	86,00 %

Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, ditetapkan kategori penilaian capaian indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.2 Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis Dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	75% - 84%	Baik
3	56% - 74%	Cukup
4	< 55%	kurang

Untuk menghitung besaran persentase capaian kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.3. Analisis Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022

Guna melihat realisasi dan capaian kinerja terkait dengan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat dilihat pada analisis berikut :

3.3.1. Sasaran 1: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

a) Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Salah satu tujuan dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatkan kinerja organisasi melalauai tata kelola Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat yang baik, bersih dan profesional. Profesional diartikan menunjukkan mutu dan kualitas, yaitu seseorang yang memiliki 3 hal pokok dalam dirinya (*Skill, Knowledge dan Attitude*). *Skill* berarti seseorang itu benar-benar ahli di bidangnya. *Knowledge* berarti tak hanya ahli di bidangnya, tapi juga menguasai, minimal tahu dan berwawasan tentang ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan bidangnya. Dan yang terakhir *Attitude*, yang mana bukan hanya pintar dan cerdas, tapi juga punya etika yang diterapkan dalam bidangnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat sasaran yang perlu dipenuhi yaitu Meningkatnya Tata Kelola Organisasi, dengan Indikator Kinerja yang perlu dicapai ialah Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Adapun lingkup tata kelola organisasi pada Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat mencakup kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi, kualitas pelayanan internal organisasi, kualitas penatausahaan keuangan, dan pengawasan internal organisasi. Untuk mendapatkan hasil pengukuran dari indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja nantinya berdasarkan hasil penilaian LAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat selaku tim evaluator Provinsi dan Biro Organisasi selaku OPD pembimbing.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Provinsi pada tahun 2022, untuk realiasi kinerja indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2021 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai BB dengan besaran nilai 73,53. Realisasi ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk Tahun 2022 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera

Barat kemudian menetapkan target nilai akuntabilitas kinerja yang perlu dicapai ialah BB. Kemudian nantinya terkait realisasi kinerja dari indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk tahun 2022 akan diperoleh dari hasil penilaian LAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat selaku tim evaluator Provinsi dan Biro Organisasi selaku OPD pembimbing, untuk ringkasannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Pengukuran Target Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	Tim Evaluator

c) Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan Tahun Lalu

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2020,2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2020, 2021 dan 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	73,52	73,53	73.60	73,52	73,53	-	100	100	-
		BB	BB	BB	BB	BB	-	100	100	-

Sumber data : LAKIP

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun sebelumnya, yaitu 2020 dan 2021, Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk nilai capaian pada tahun 2022 belum dapat dijabarkan karena nilai yang didapat berdasarkan pada hasil penilaian LAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat selaku tim evaluator Provinsi dan Biro Organisasi selaku OPD pembimbing.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan Target Tahun 2021 s/d 2022 terhadap Renstra

Untuk perbandingan realisasi kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas, hanya dapat dilakukan untuk target dan realisasi pada tahun 2021 disebabkan untuk realisasi pada tahun 2022 belum dapat dibandingkan dengan target karena belum adanya variabel penilaian yang diterima Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat dari Inspektorat selaku tim evaluator Provinsi dan Biro Organisasi

selaku OPD pembimbing. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja s/d 2022 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2022	TARGET 2021	REALISASI 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	73.53 BB	73.53 BB	73.60 BB	-

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sampai dengan 2022 baru berada pada angka (BB) masih beberapa poin dibawah standar minimal nilai A yaitu 80,01.

e) Hambatan dalam Peningkatan Kinerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Dalam merealisasikan target kinerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2022 terdapat beberapa faktor penghambat dalam pencapaian target yaitu sebagai berikut:

- Tidak samanya pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memahami sistem akuntabilitas kinerja sehingga membutuhkan waktu khusus untuk menyamakan persepsi di internal Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang.
- Adanya pola pikir yang masih mengukur kinerja berdasarkan output bukan outcome.
- Belum sinkronnya hubungan antara sasaran yang hendak dicapai dengan alat (program/kegiatan) yang digunakan.

f) Upaya/Tindak Lanjut yang dilakukan untuk Peningkatan Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Untuk dapat memenuhi pencapaian target Nilai LAKIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera pada tahun 2022, maka telah dilakukan beberapa upaya dan tindak lanjut untuk peningkatan kinerja sebagai berikut:

- Adanya perbaikan sistem SAKIP yang ditetapkan oleh Gubernur untuk meningkatkan nilai kinerja provinsi dengan melibatkan secara langsung para pejabat dan ahli yang berwenang dari Kemeterian PAN dan RB.

- Proses SAKIP dimonitor langsung melalui Biro Organisasi sehingga perbaikan kinerja dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.
- Adanya perbaikan terhadap sistem SAKIP berdasarkan hasil evaluasi tahunan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
- Adanya perbaikan pada dokumen kinerja (LKJ) dan kelengkapan data dukungannya.
- Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target, mengidentifikasi permasalahan dan merencanakan pemecahan masalahnya.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang)

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan, pastinya membutuhkan program dan kegiatan yang mendukung. Program pada Sekretariat yang mendukung dalam pencapaian target kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat ialah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Untuk lebih jelasnya penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan program/kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Program/Kegiatan Pendukung Capaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	49.739.500,00	45.405.735,80	91,29
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.739.500,00	45.405.735,80	91,29
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.739.500,00	45.405.735,80	91,29

Untuk pencapaian target kinerja indikator ini juga dibutuhkan anggaran ataupun kegiatan khusus/tersendiri. Pada tahun 2022, Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat sendiri telah menganggarkan sekitar Rp. 49.739.500,00 pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD untuk mendukung Program dan kegiatan yang berpengaruh untuk merealisasikan kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas. Kemudian juga telah dilakukan perbaikan-

perbaikan dalam mencapai target yang diimplementasikan dalam bentuk rapat-rapat yang sifatnya pemantauan berkala, maupun untuk koordinasi/konsultasi dengan instansi/pihak terkait dengan memanfaatkan dana yang ada pada kegiatan penunjang tersebut.

3.3.2. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

a) Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

Pengukuran pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi yang merupakan cerminan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan tata Ruang Provinsi Sumatera Barat yang melayani dengan profesional diukur melalui 1 indikator kinerja sasaran yaitu Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.

Sumber data indikator kinerja sasaran Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi didapat melalui hasil survei kepuasan dengan menggunakan form kuesioner terhadap kinerja pelayanan Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat. Kuesioner ini diisi oleh rekanan, penyedia dan konsultan (Bidang/UPTD) serta pegawai Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat (Sekretariat) terkait dengan layanan sesuai dengan tupoksinya pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Untuk mengukur Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017, dengan rincian sebagaimana yang ada pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017

NILAI INTERVAL	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00-64,99	D	Tidak Baik
65,00-76,60	C	Kurang Baik
76,61-88,30	B	Baik
88,31-100,00	A	Sangat Baik

Metode perhitungan dilakukan dengan menggunakan Skala 1 sampai 4, dimana pilihan A bernilai 4, B bernilai 3, C bernilai 2, dan D bernilai 1, untuk masing-masing pertanyaan yang disebar dalam bentuk kuesioner. Dari 11 pertanyaan (untuk responden

1 orang), nilai maksimal yang mungkin didapat ialah 44. Sebagai contoh dimisalkan perhitungan untuk masing-masing skala penilaian ialah sebagai berikut:

- 4 Pertanyaan dinilai "A", maka $4 \times 4 = 16$
- 3 Pertanyaan dinilai "B", maka $3 \times 3 = 9$
- 3 Pertanyaan dinilai "C", maka $3 \times 2 = 6$
- 1 Pertanyaan dinilai "D", maka $1 \times 1 = 1$

Semua hasil penilaian tersebut kemudian ditotal untuk mendapatkan nilai untuk 1 responden yaitu 32. Untuk mendapatkan indeks penilaian pelayanan publik (1 responden) digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Kepuasan} \\ \text{Terhadap Pelayanan} \\ \text{Organisasi} &= \frac{\text{Total nilai untuk 1 responden}}{\text{Total nilai maksimal}} \times 100\% \\ &= \frac{32}{44} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Kepuasan} \\ \text{Terhadap Pelayanan} \\ \text{Organisasi} &= 72,73 \% \text{ (Mutu Layanan C (Kurang Baik))} \end{aligned}$$

Mengacu pada metode penilaian di atas, maka setelah kuesioner diisi oleh rekanan, penyedia dan konsultan (Bidang/UPTD) serta pegawai Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat (Sekretariat), data rekapitulasi hasil kuesioner pelayanan publik untuk penentuan realisasi kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat dapat dianalisis dengan cara mengambil nilai rata-rata dari semua nilai responden yang telah mengisi kuesioner. Dari hasil perhitungan, kemudian didapatkan nilai indikator kinerja untuk Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi ialah sebesar 90,32%. Dengan indikasi nilai berada pada rentang 88,31-100,00, maka nilai mutu dan kinerja unit pelayanan (berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dapat dikategorikan sebagai **A (Sangat Baik)**.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2022

Berdasarkan data pada kuesinor yang telah diisi, kepuasan terhadap terhadap pelayanan Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2022 dengan target 73,60% dapat terealisasi sebesar 90,32% dengan tingkat capaian kinerja yang dapat dihitung secara matematis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{90,32\%}{73,60\%} \times 100\% \\ \% \text{ Capaian Kinerja} &= 122,71\% \end{aligned}$$

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	73,60%	90,32%	122,71%

Dari hasil perhitungan tersebut, Dinas BMCKT Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 berhasil mencapai kinerja sebesar 122,71%. Hal ini menunjukkan bahwa pihak ketiga yang telah melakukan kerja sama dengan Bidang/UPTD Dinas serta internal Dinas sudah puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat. Dengan pencapaian target sebesar 122,71%, maka klasifikasi penilaian untuk Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dapat diindikasikan sebagai **Sangat Baik**.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dengan Tahun Lalu

Perbandingan realisasi kinerja & capaian dengan tahun lalu dilakukan untuk menunjukkan capaian yang telah diraih dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Hal tersebut bertujuan untuk memperlihatkan kenaikan atau penurunan capaian. Realisasi kinerja dan capaian Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada tahun 2020, 2021 & 2022 dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Realisasi Kinerja & Capaian Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi tahun 2020, 2021 dan 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Persentase Bangunan Strategis Terbangun	-	-	73,60	-	-	90,32	-	-	122,71

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi baru ada pada tahun 2022. Dengan target kinerja sebesar 73,60%,

realisasi kinerja yang dapat dicapai ialah sebesar 90,32% dengan capaian kinerja sebesar 122,71%.

d) Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

Survei Kepuasan Pelayanan Publik pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan kegiatan pengukuran tentang tingkat kepuasan rekanan, penyedia dan konsultan serta pegawai dinas terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Bidang/UPTD maupun Sekretariat sebagai penyelenggara pelayanan publik di Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dinas dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Adapun yang mendukung tercapainya target kinerja untuk Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi ialah sebagai berikut:

- Telah terlalankannya tupoksi pada masing-masing Bidang/UPTD maupun Sekretariat dengan baik dan efisien, sehingga program/kegiatan yang dilakukan bersama rekanan, penyedia serta kebutuhan pegawai dapat diayomi dengan baik.
- Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat telah mampu mengelola dan membekali aparat menjadi sumber daya insan yang dimiliki sehingga dapat menyampaikan pelayanan yang prima.
- Kemudahan dalam menyebarkan kuesioner dan mendapatkan respon yang cepat dari rekanan, penyedia dan juga pegawai, membantu aparat terkait dalam menganalisis data dengan cepat dan tepat.

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang)

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi sesuai dengan apa yang direncanakan, dibutuhkan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut. Program pada Sekretariat yang mendukung dalam pencapaian target kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat ialah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Untuk lebih jelasnya

penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan program/kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Program/Kegiatan Pendukung Capaian Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	178.645.420,00	168.588.976,00	94,37
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	178.645.420,00	168.588.976,00	94,37
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	178.645.420,00	168.588.976,00	94,37

Untuk pencapaian target kinerja indikator ini juga dibutuhkan anggaran ataupun kegiatan khusus/tersendiri. Pada tahun 2022, Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat sendiri telah menganggarkan sekitar Rp. 178.645.420,00 pada sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah untuk mendukung Program dan kegiatan yang berpengaruh untuk merealisasikan kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.

3.3.3. Sasaran 3: Meningkatnya Kemantapan Jalan

a) Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Indikator Rasio Kemantapan Jalan

Kemantapan jalan merupakan definisi dalam penanganan jalan yang menyatakan kualitas fisik dan layanan jalan yang dianggap cukup untuk memenuhi syarat minimal bahwa suatu ruas jalan dapat dioperasikan dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 600-903.1-2015 tentang Penetapan Ruas-ruas jalan menurut Fungsi dan Statusnya, diketahui bahwa total panjang jalan provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat ialah 1525,2 Km. Hasil pengukuran indikator Persentase kemantapan jalan berdasarkan laporan akhir survey IRMS (Integrated Road Management System) ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.11 Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Barat Per Ruas Tahun 2022

No	No Ruas	RUAS	Lokasi Kabupaten / Kota	Panjang SK	Panjang Tiap Permukaan					Panjang Tiap Kondisi								Kemantapan			
					Hotmix	Lapen	Beton	Kerikil	Tanah	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Mantap		Tidak Mantap	
					Km	Km	Km	Km	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km
1	007	Simancung - Tanjung Ampalu	Kab. Sijunjung	11,080	10,98	0,00	0,10	0,00	0,00	67%	7,38	27%	3,00	6%	0,70	0%	0,00	93,7%	10,38	6,3%	0,70
2	008	Tanjung Ampalu- Sijunjung	Kab. Sijunjung	20,000	17,60	0,00	2,40	0,00	0,00	57%	11,30	30%	6,00	13%	2,60	1%	0,10	86,5%	17,30	13,5%	2,70
3	010	Simp. Sikabau - Simp. Koto Baru	Kab. Dharmasraya	29,000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59%	17,01	18%	5,10	20%	5,89	3%	1,00	76,2%	22,11	23,8%	6,89
4	011	Simp. Koto Baru - Simalidu	Kab. Dharmasraya	11,900	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	66%	7,90	9%	1,10	21%	2,50	3%	0,40	75,6%	9,00	24,4%	2,90
5	012	Simp. Koto Baru - Junction	Kab. Dharmasraya	5,400	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72%	3,90	22%	1,20	4%	0,20	2%	0,10	94,4%	5,10	5,6%	0,30
6	018	Inderapura - Muara Sakai	Kab. Pesisir Selatan	7,300	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	88%	6,40	11%	0,80	1%	0,10	0%	0,00	98,6%	7,20	1,4%	0,10
7	025	Manggopoh - Padang Luar	Kab. Agam	69,430	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	72%	50,03	5%	3,80	21%	14,90	1%	0,70	77,5%	53,83	22,5%	15,60
8	028	Sicincin - Kurai Taji	Kab. Padang Pariaman	16,440	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	54%	8,94	18%	2,90	26%	4,30	2%	0,30	72,0%	11,84	28,0%	4,60
9	031	Panti - Simp. Empat	Kab. Pasaman - Kab Pasaman Barat	74,230	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	56%	41,43	22%	16,50	17%	12,50	5%	3,80	78,0%	57,93	22,0%	16,30
10	033	Simp. Empat - Sasak	Kab. Pasaman Barat	20,000	19,90	0,00	0,10	0,00	0,00	87%	17,40	10%	2,00	2%	0,40	1%	0,20	97,0%	19,40	3,0%	0,60
11	034,2	Air Balam - Air Bangis	Kab. Pasaman Barat	12,600	12,50	0,00	0,10	0,00	0,00	89%	11,20	9%	1,10	2%	0,30	0%	0,00	97,6%	12,30	2,4%	0,30
12	035	Kubu Kerambil - Batu Sangkar	Kab. Tanah Datar	18,500	17,80	0,00	0,70	0,00	0,00	36%	6,70	35%	6,50	25%	4,70	3%	0,60	71,4%	13,20	28,6%	5,30
13	036	Baso - Batu Sangkar	Kab. Agam - Kab. Tanah Datar	28,790	28,59	0,00	0,20	0,00	0,00	69%	19,99	14%	3,90	12%	3,40	5%	1,50	83,0%	23,89	17,0%	4,90
14	037	Batu Sangkar (Bukit Gombak)- Guguk Cino	Kab. Tanah Datar	10,400	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77%	8,00	1%	0,10	19%	2,00	3%	0,30	77,9%	8,10	22,1%	2,30
15	038	Guguk Cino - Sawah Lunto (Lapangan Segitiga)	Kab. Tanah Datar - Kota Sawahlunto	30,600	28,30	0,00	2,30	0,00	0,00	73%	22,27	17%	5,23	7%	2,10	3%	1,00	89,9%	27,50	10,1%	3,10
16	039	Guguk Cino - Sitangkai	Kab. Tanah Datar	15,120	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81%	12,20	11%	1,72	5%	0,80	3%	0,40	92,1%	13,92	7,9%	1,20

No	No Ruas	RUAS	Lokasi Kabupaten / Kota	Panjang SK	Panjang Tiap Permukaan					Panjang Tiap Kondisi								Kemantapan			
					Hotmix	Lapen	Beton	Kerikil	Tanah	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Mantap		Tidak Mantap	
					Km	Km	Km	Km	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km
17	040	Sitangkai - Tanjung Ampalu	Kab. Tanah Datar - Kab.Sijunjung	17,280	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	60%	10,38	18%	3,10	16%	2,80	6%	1,00	78,0%	13,48	22,0%	3,80
18	044	Bts. Payahkumbuh - Sitangkai	Kota. Payakumbuh - Kab. Tanah Datar	50,610	49,01	0,00	1,60	0,00	0,00	55%	27,96	30%	15,15	8%	4,20	7%	3,30	85,2%	43,11	14,8%	7,50
19	054	Junction - Abai Siat	Kab. Dharmasraya	12,600	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97%	12,20	2%	0,30	1%	0,10	0%	0,00	99,2%	12,50	0,8%	0,10
20	055	Sijunjung - Tanah Badantung	Kab. Sijunjung	4,400	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77%	3,40	18%	0,80	5%	0,20	0%	0,00	95,5%	4,20	4,5%	0,20
21	056,1	Simp. Padang Aro - Lubuk Malako	Kab. Solok Selatan	20,000	17,90	0,00	2,10	0,00	0,00	65%	12,90	26%	5,20	5%	1,00	5%	0,90	90,5%	18,10	9,5%	1,90
22	056,2	Lubuk Malako - Abai Sangir	Kab. Solok Selatan	17,000	16,90	0,00	0,10	0,00	0,00	47%	8,00	8%	1,40	32%	5,50	12%	2,10	55,3%	9,40	44,7%	7,60
23	056,3	Abai Sangir - Sei. Dareh	Kab. Solok Selatan - Kab. Dharmasraya	74,000	23,60	0,00	0,40	50,00	0,00	24%	17,90	6%	4,70	1%	1,00	68%	50,40	30,5%	22,60	69,5%	51,40
24	068	Padang Sawah - Kumpulan	Kab. Pasaman Barat - Kab. Pasaman	36,500	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66%	24,04	18%	6,57	9%	3,45	7%	2,45	83,8%	30,61	16,2%	5,90
25	069,2	Bts. Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	Kota Payakumbuh - Kab. 50 Kota	46,850	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	90%	42,35	2%	1,10	7%	3,35	0%	0,05	92,7%	43,45	7,3%	3,40
26	070	Batu Sangkar - Ombilin	Kab. 50 Kota	18,510	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	59%	10,90	22%	4,10	13%	2,41	6%	1,10	81,0%	15,00	19,0%	3,51
27	071	Solok - Alahan Panjang	Kota Solok - Kab. Solok	47,800	47,70	0,00	0,10	0,00	0,00	85%	40,80	10%	4,70	3%	1,40	2%	0,90	95,2%	45,50	4,8%	2,30
28	072	Lubuk Basung - Sei. Limau	Kab. Agam - Kab. Padang Pariaman	30,900	30,80	0,00	0,10	0,00	0,00	69%	21,30	26%	7,90	5%	1,60	0%	0,10	94,5%	29,20	5,5%	1,70
29	073	Pasar Baru - Alahan Panjang	Kab. Pesisir Selatan - Kab. Solok	49,400	37,80	0,00	0,10	11,50	0,00	76%	37,30	6%	3,00	5%	2,69	13%	6,41	81,6%	40,30	18,4%	9,10
30	075	Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman	Kab. Padang Pariaman - Kota Pariaman	20,500	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97%	19,95	3%	0,55	0%	0,00	0%	0,00	100,0%	20,50	0,0%	0,00
31	076	Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur	Kab. 50 Kota	73,950	56,92	0,00	1,10	15,93	0,00	69%	51,22	1%	0,58	4%	2,60	26%	19,55	70,0%	51,80	30,0%	22,15
32	078	Simp. Koto Mambang-Balingka	Kab. Padang Pariaman - Kab. Agam	39,400	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95%	37,52	1%	0,28	3%	1,30	1%	0,30	95,9%	37,80	4,1%	1,60

No	No Ruas	RUAS	Lokasi Kabupaten / Kota	Panjang SK	Panjang Tiap Permukaan					Panjang Tiap Kondisi								Kemantapan			
					Hotmix	Lapen	Beton	Kerikil	Tanah	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Mantap		Tidak Mantap	
					Km	Km	Km	Km	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km
33	079	Simp. Baso - Piladang	Kab. Agam	11,140	10,54	0,00	0,60	0,00	0,00	31%	3,40	6%	0,70	52%	5,74	12%	1,30	36,8%	4,10	63,2%	7,04
34	080	Matur - Palembang	Kab. Agam	20,700	20,40	0,00	0,30	0,00	0,00	63%	13,00	19%	3,90	12%	2,50	6%	1,30	81,6%	16,90	18,4%	3,80
35	081	Palembayan - Palupuh - Simpang Patai	Kab. Agam	13,300	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	82%	10,84	0%	0,06	8%	1,00	11%	1,40	82,0%	10,90	18,0%	2,40
36	082	Alahan Panjang - Kiliran Jao	Kab. Solok - Kab. Sijunjung	72,900	17,50	0,00	1,05	18,05	36,30	19%	13,50	1%	0,80	0%	0,00	80%	58,60	19,6%	14,30	80,4%	58,60
37	083	Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan	Kota Padang - Kab. Pesisir Selatan	44,100	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%	43,46	1,3%	0,59	0%	0,05	0%	0,00	99,9%	44,05	0,1%	0,05
38	084	Jalan Lingkar Selatan (Payakumbuh)	Kota Payakumbuh	14,170	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	67%	9,47	12%	1,70	19%	2,70	2%	0,30	78,8%	11,17	21,2%	3,00
39	085	Simp. Padang Karambia - Tj. Bungo (TPA Regional)	Kota Payakumbuh	2,050	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	76%	1,55	15%	0,30	0%	0,00	10%	0,20	90,2%	1,85	9,8%	0,20
40	086	Surantiah - Kayu Aro - Langgai	Kab. Pesisir Selatan	27,700	13,20	0,00	3,10	11,40	0,00	37%	10,30	9%	2,60	6%	1,80	47%	13,00	46,6%	12,90	53,4%	14,80
41	087	Duku - Sicincin	Kab. Padang Pariaman	28,650	2,60	0,00	0,25	1,57	24,23	10%	2,85	5%	1,57	0%	0,00	85%	24,23	15,4%	4,42	84,6%	24,23
42	088	Padang Koto Gadang - Palembang	Kab. Agam	31,000	30,90	0,00	0,10	0,00	0,00	78%	24,30	6%	2,00	11%	3,40	4%	1,30	84,8%	26,30	15,2%	4,70
43	089	Jl. Balingka Terowongan Nagari Sianok	Kab. Agam - kab. 50 Kota	9,700	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	9,70	0,0%	0,00	100,0%	9,70
44	090	Palupuh - Puagadih - Koto Tinggi	Kab. Sijunjung - Kota Sawahlunto	25,000	17,90	0,00	2,20	4,90	0,00	53%	13,23	3%	0,78	11%	2,70	33%	8,30	56,0%	14,01	44,0%	11,00
45	091	Simp. Napar - Bukit Bual - Tanjung Ampalu	Kab. Tanah Datar - Kab. Solok	23,000	17,60	0,00	0,00	5,40	0,00	49%	11,30	20%	4,70	6%	1,30	25%	5,70	69,6%	16,00	30,4%	7,00
46	092	Simp. Ganting - Bts. Tanah Datar - Sumani	Kab. Solok - Kab. Tanah Datar	28,400	28,00	0,00	0,40	0,00	0,00	94%	26,80	1%	0,40	4%	1,20	0%	0,00	95,8%	27,20	4,2%	1,20
47	093	Singkarak - Aripa - Tanjung - Balit	Kab. Solok	30,000	29,90	0,00	0,10	0,00	0,00	42%	12,73	39%	11,57	16%	4,80	3%	0,90	81,0%	24,30	19,0%	5,70
48	094	Pintu Angin - Labua Saiyo	Kab. Solok	5,500	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91%	5,00	5%	0,30	2%	0,10	2%	0,10	96,4%	5,30	3,6%	0,20

No	No Ruas	RUAS	Lokasi Kabupaten / Kota	Panjang SK	Panjang Tiap Permukaan					Panjang Tiap Kondisi								Kemantapan			
					Hotmix	Lapen	Beton	Kerikil	Tanah	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Mantap		Tidak Mantap	
					Km	Km	Km	Km	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km
49	095	Rao Rokan - Batas Riau	Kab. Pasaman	33,000	32,90	0,00	0,10	0,00	0,00	51%	16,80	22%	7,20	19%	6,30	8%	2,70	72,7%	24,00	27,3%	9,00
50	096	Lubuk Sikaping - Talu	Kab. Pasaman Barat - Kab. Pasaman	28,000	18,00	0,00	0,20	9,80	0,00	64%	18,00	1%	0,20	0%	0,00	35%	9,80	65,0%	18,20	35,0%	9,80
51	097	Bungo Tanjung - Teluk Tapang	Kab. Pasaman Barat	43,200	19,60	0,00	0,00	0,00	23,60	38%	16,20	0%	0,20	0%	0,10	62%	26,70	38,0%	16,40	62,0%	26,80
52	098	Teluk Bayur - Nipah - Purus	Kota Padang	12,000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82%	9,80	18%	2,10	1%	0,10	0%	0,00	99,2%	11,90	0,8%	0,10
53	099	Purus - BIM	Kota Padang	16,000	0,40	0,00	0,00	0,00	15,60	3%	0,50	0%	0,00	0%	0,00	97%	15,50	3,1%	0,50	96,9%	15,50
54	100	Batu Batembak - Pelabuhan Penasahan	Kab. Pesisir	1,200	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	1,20	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100,0%	1,20	0,0%	0,00
55	101	Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur	Kab. 50 Kota - Kab. Pasaman	47,000	35,50	0,00	0,10	11,40	0,00	37%	17,27	12%	5,64	12%	5,60	39%	18,50	48,7%	22,91	51,3%	24,10
56	102	Rawang - Talawi	Kab. Solok - Kota Sawah Lunto	6,000	3,80	0,00	2,20	0,00	0,00	28%	1,68	12%	0,70	9%	0,53	52%	3,10	39,6%	2,38	60,4%	3,63
57	103	Simp. SP II - Kantor Camat	Kab. Mentawai	5,100	0,00	0,00	4,10	0,00	1,00	43%	2,20	41%	2,10	14%	0,70	2%	0,10	84,3%	4,30	15,7%	0,80
58	104	Kantor Camat - Berkat	Kab. Mentawai	5,900	0,00	0,00	3,47	0,00	2,43	38%	2,27	10,7%	0,63	0%	0,00	51%	3,00	49,2%	2,90	50,8%	3,00
JUMLAH				1525,20	Hotmix	Lapen	Beton	Kerikil	Tanah	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Mantap		Tidak Mantap	
					1240,57	0,00	31,82	139,95	112,86	60,18%	917,82	11,22%	171,12	8,63%	131,61	19,98%	304,69	71,40%	1088,94	28,61%	436,30

Sumber data : Laporan Akhir Survey IRMS 2022

Berdasarkan laporan hasil survey IRMS yang telah dilakukan, diperoleh bahwa Rasio Kemantapan Jalan provinsi pada Tahun 2022 sebesar 71,40%, dimana secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Kemantapan Jalan} &= \frac{\text{Total Panjang Jalan Mantap Per Ruas (Km)}}{\text{Total Panjang Jalan Provinsi (Km)}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Panjang Jalan Kondisi Baik + Sedang (Km)}}{\text{Total Panjang Jalan Provinsi (Km)}} \times 100\% \\
 &= \frac{(917,82 + 171,12) \text{ Km}}{1525,20 \text{ Km}} \times 100\% \\
 \text{Rasio Kemantapan Jalan} &= 71,40 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja yang dapat dicapai pada tahun 2022 untuk Rasio Kemantapan Jalan Provinsi ialah sebesar 71,40%.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2022

Dari hasil perhitungan realisasi yang dapat dicapai pada tahun 2022 untuk Rasio Kemantapan Jalan Provinsi, kemudian dapat dihitung capaian kinerjanya dengan cara membandingkan nilai realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi tahun berjalan (75% untuk tahun 2022). Perhitungan nilai capaian kinerja secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{71,40\%}{75\%} \times 100\% \\
 \% \text{ Capaian Kinerja} &= 95,2 \%
 \end{aligned}$$

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Indikator Rasio Kemantapan Jalan Provinsi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	75%	71,40%	95,2%

Dengan pencapaian target sebesar 95,2%, maka klasifikasi penilaian untuk Rasio Kemantapan Jalan Provinsi adalah **Sangat Baik**.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Rasio Kemantapan Jalan Provinsi dengan Tahun Lalu

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian Rasio Kemantapan Jalan Provinsi pada tahun 2020, 2021 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Rasio Kemantapan Jalan tahun 2020, 2021 dan 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Rasio Kemantapan Jalan	72	73	75	72,058	73,015	71,40	100,08	100,02	95,2

Sumber data : LAKIP

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Rasio Kemantapan Jalan Provinsi dari tahun 2020 dan 2021 berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Namun untuk tahun 2022, target yang telah ditetapkan tidak berhasil dicapai dengan realisasi yang dapat terlaksana ialah sebesar 71,40% dari target 75%. Belum tercapainya target Rasio Kemantapan Jalan pada tahun 2022 salah satunya disebabkan karena terjadinya bencana alam pada tahun 2022 (gempa bumi di Pasaman, banjir bandang, longsor dan terban) di ruas-ruas jalan provinsi. Hal ini mengakibatkan penurunan kondisi ruas jalan yang semula berada pada kondisi mantap menjadi tidak mantap. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait tidak tercapainya target Rasio Kemantapan jalan akan dijelaskan pada subbab *Penyebab Tidak Tercapainya Peningkatan Kinerja*.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Provinsi dengan Target Tahun 2022 terhadap Renstra

Pada Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2021-2026 telah ditetapkan target yang perlu dicapai untuk Rasio Kemantapan Jalan Provinsi pada tahun 2022 ialah sebesar 75%. Adapun perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 yang telah dihitung sebelumnya dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Kemantapan Jalan s/d 2022 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI s/d 2022	TARGET s/d 2022	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	71,40%	75%	95,2%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian Rasio Kemantapan Jalan Provinsi ialah sebesar 95,2% dari target Akhir Periode Renstra.

e) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Berdasarkan data dari Balai Pelaksanaan Jalan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat, diketahui bahwa Persentase Kemantapan Jalan Nasional, yang mana memiliki perhitungan yang sama dengan Rasio Kemantapan Jalan provinsi, pada tahun 2022 mencapai nilai sebesar 92,03%, sementara Kemantapan Jalan Provinsi berada pada posisi 71,40%. Perbandingan Kemantapan Jalan Nasional dan Provinsi pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Persentase Kemantapan Jalan Dengan Standar Nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI (2022)		DEVIASI
		PROVINSI (%)	NASIONAL (%)	
1.	Rasio Kemantapan Jalan	71,40	92,03	-20,63

Dari tabel di atas, dapat diindikasikan bahwa nilai Kemantapan Jalan Nasional lebih tinggi dibanding jalan Provinsi, yaitu dengan selisih 20,63%.

f) Hambatan dalam Peningkatan Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Provinsi

Indikator Kinerja Rasio Kemantapan Jalan pada tahun 2022 mencapai realisasi kinerja sebesar 71,39%. Realisasi tersebut tidak memenuhi target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu sebesar 75%, sehingga capaian kinerja yang dapat diraih yaitu sebesar 95,2%. Belum tercapainya target Rasio Kemantapan Jalan pada tahun 2022 disebabkan karena terjadinya bencana alam pada tahun 2022 (gempa bumi di Pasaman, banjir bandang, longsor dan terban) di ruas-ruas jalan provinsi. Kondisi alam yang sangat mempengaruhi (perbukitan dan jurang) dan keterbatasan jumlah peralatan (alat berat) untuk mendukung pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, hal ini mengakibatkan penurunan kondisi ruas jalan yang semula berada pada kondisi mantap menjadi tidak mantap. Kemudian juga, tidak tercapainya target persentase jalan mantap

ini dikarenakan survey pada tahun sebelumnya tidak melakukan penghitungan pada ruas jalan yang tidak bisa dilewati, sedangkan pada survey tahun 2022 ruas jalan yang tidak bisa dilewati tetap dihitung dengan dikategorikan ke dalam kategori rusak berat, beberapa ruas jalan tersebut diantaranya ruas jalan Abai Sangir Sei. Dareh (P.056.3), ruas jalan Alahan Panjang - Kiliran Jao (P.082), ruas jalan Purus - BIM (P.099), dan ruas jalan Duku - Sicincin (P.087).

g) Upaya/Tindak Lanjut yang dilakukan untuk Peningkatan Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Provinsi

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ruas jalan yang terkoneksi jalan mantap di masa yang akan datang antara lain:

- Lelang Dini agar penyelesaian pekerjaan juga bisa dipercepat dan bisa diinventarisir penanganan yang lebih optimal di anggaran perubahan
- Untuk menutup timpangnya usulan dengan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), maka perlu untuk mengoptimalkan pengusulan pola pendanaan-pendanaan lainnya
- Perencanaan program pengusulan sesuai database PKRMS jalan provinsi
- Tetap memperhatikan kebutuhan dana jalan di wilayah agar dicapai jalan yang tetap bisa mempertahankan umur rencana dalam kondisi mantap
- Mencari alternatif pengembangan terkoneksi agar ada jalur alternatif untuk mencapai daerah yang terkoneksi, apabila ada terjadi jalan terganggu (longsor dan terban)
- Mengalokasikan dana secara konsisten agar jalan terkoneksi terjaga kondisinya
- Harus diadakan peralatan (alat berat) yang memadai
- Dibuat peraturan terkait overload (beban berlebih) kendaraan dan kerjasama dengan Dinas Perhubungan (Stakeholder terkait).

h) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang)

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran/target indikator kinerja Rasio Kemantapan jalan Provinsi yang ada di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sudah sangat sesuai, yaitu Program Penyelenggaraan Jalan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mendukung realisasi kinerja tersebut adalah Penyelenggaraan Jalan Provinsi. Untuk lebih jelasnya penggunaan

sumber daya untuk pelaksanaan program/kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.16 Realiasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Capaian Rasio
Kemantapan Jalan Provinsi**

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	272.058.925.993,00	257.012.759.145,58	94,47
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	272.058.925.993,00	257.012.759.145,58	94,47
Penyusunan rencana, kebijakan, strategis pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis perencanaan jalan dan jembatan	3.230.127.291,00	3.208.262.529,92	99,32
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	8.200.000.000,00	7.667.047.397,00	93,50
Pembangunan Jalan	29.652.035.055,00	24.652.375.659,00	83,14
Pelebaran Jalan Menuju Standar	10.752.507.835,00	10.743.437.219,88	99,92
Pelebaran Jalan Menambah Lajur	2.493.598.273,00	982.121.611,92	39,39
Rekonstruksi Jalan	58.496.194.746,00	52.740.980.416,40	90,16
Rehabilitasi Jalan	64.096.772.405,00	62.613.586.557,90	97,69
Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I - Pasaman)	7.886.214.894,00	7.877.263.148,56	99,89
Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II - Payakumbuh)	7.796.556.380,00	7.794.849.052,00	99,98
Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III - Bukittinggi)	6.007.429.000,00	6.007.405.000,00	100,00
Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV - Solok)	5.138.523.605,00	5.137.022.946,00	99,97
Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V - Sijunjung)	5.439.158.032,00	5.439.093.070,00	100,00
Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI - Pariaman)	3.357.227.025,00	3.356.896.374,00	99,99
Pemeliharaan Berkala Jalan	35.754.451.800,00	35.305.401.682,00	98,74
Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Workshop dan Peralatan)	2.053.254.806,00	2.004.348.174,00	97,62
Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I - Pasaman)	923.331.490,00	923.239.529,00	99,99
Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II - Payakumbuh)	955.716.860,00	954.278.769,00	99,85
Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III - Bukittinggi)	775.384.415,00	775.355.675,00	100,00
Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV - Solok)	840.544.592,00	838.127.942,00	99,71

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (%)
Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V - Sijunjung)	712.062.338,00	712.024.504,00	99,99
Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI - Pariaman)	812.923.808,00	811.182.804,00	99,79
Pembangunan Jembatan	4.537.164.329,00	4.509.972.740,00	99,40
Penggantian Jembatan	7.031.002.100,00	7.025.487.537,00	99,92
Rehabilitasi Jembatan	473.077.713,00	455.131.072,00	96,21
Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPTD Workshop dan Peralatan)	1.755.878.775,00	1.755.525.018,00	99,98
Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat	99.114.850,00	92.586.400,00	93,41
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.437.671.745,00	1.330.327.200,00	92,53
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	77.008.604,00	41.002.956,00	53,24
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (UPTD laboratorium Bahan Konstruksi)	1.273.993.227,00	1.258.426.161,00	98,78

Bedasarkan data tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 272.058.925.993,00 dengan realiasi anggaran yang dapat diserap ialah sebesar Rp. 257.012.759.145,58. Namun dari capaian realiasasi anggaran yang mencapai 94,47% tersebut, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat masih mengalami kendala dimana untuk meningkatkan kondisi kemantapan jalan sebesar 2% dibutuhkan pembangunan/rekonstruksi jalan sepanjang 30 Km, sedangkan kondisi anggaran yang tersedia pada tahun 2022 hanya mampu untuk melaksanakan pembangunan jalan sepanjang 18,816 Km.

3.3.4. Sasaran 4: Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak

a) Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Indikator Akses Air Minum Layak

Sasaran selanjutnya yang ada pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak dengan indikator kinerja yang perlu dicapai yaitu Akses Air Minum Layak. Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia. Dapat dipastikan manusia tidak akan mampu bertahan hidup tanpa air, karena air merupakan salah satu elemen dasar yang menunjang proses metabolisme tubuh manusia. Air yang layak minum adalah air yang berwarna jernih, tidak berbau, rasanya tawar, dan tidak terpapar sinar matahari

secara langsung. Selain itu, air yang aman untuk diminum juga harus bebas dari sumber pencemaran, seperti binatang yang membawa penyakit, logam atau bahan kimia lainnya

Penyediaan air minum layak merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakatnya. Baik dengan pengelolaan berbasis bisnis, distribusi, maupun pemberdayaan masyarakat. Pemerintah berupaya untuk menyediakan Air minum khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu caranya adalah dengan menjaga ketersediaan kualitas air minum yang cukup dengan mendorong penyediaan infrastruktur dasar pemukiman di daerah perkotaan.

Cakupan air minum layak merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target *Universal Access Nasional*. Pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, untuk data pengukuran pencapaian sasaran Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak diperoleh oleh Bidang Cipta Karya melalui "Rekapitulasi Analisa Data Cakupan Akses Penyediaan Layanan Air Minum dan Daerah Rawan Air Per kab/kota di Sumatera Barat sampai tahun 2022" yang bersumber dari data PDAM Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat dan Pamsimas. Adapun rincian data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17 Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah	TIDAK AKSES (Rumah)	AKSES			Persen (%)			
				Jaringan Perpipaan (Rumah)	Bukan Jaringan Perpipaan (Rumah)	Jumlah (Rumah)	Tidak Akses Rumah	Jaringan Perpipaan Rumah	Bukan Jaringan Perpipaan Rumah	Jumlah Rumah
1	Agam	116.418	17.532	59.583	39.303	98.886	15,06	51,18	33,76	84,94
2	Dharmasraya	58.526	6.848	15.625	36.053	51.678	11,7	26,7	61,6	88,3
3	Kepulauan Mentawai	13.934	5.890	3.567	4.477	8.044	42,27	25,6	32,13	57,73
4	Lima Puluh Kota	61.126	17.507	15.972	27.647	43.619	28,64	26,13	45,23	71,36
5	Padang Pariaman	92.129	21.393	42.121	28.615	70.736	23,22	45,72	31,06	76,78
6	Pasaman	59.970	10.015	40.840	9.115	49.955	16,7	68,1	15,2	83,3
7	Pasaman Barat	93.567	22.026	17.029	54.512	71.541	23,54	18,2	58,26	76,46
8	Pesisir Selatan	107.610	12.375	49.727	45.508	95.235	11,5	46,21	42,29	88,5
9	Sijunjung	56.324	15.405	13.236	27.683	40.919	27,35	23,5	49,15	72,65
10	Kabupaten Solok	118.956	30.405	30.548	58.003	88.551	25,56	25,68	48,76	74,44
11	Solok Selatan	38.140	10.119	11.903	16.118	28.021	26,53	31,21	42,26	73,47
12	Tanah Datar	79.187	16.669	21.238	41.280	62.518	21,05	26,82	52,13	78,95

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah	TIDAK AKSES	AKSES			Persen (%)			
				Jaringan Perpipaan	Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah	Tidak Akses	Jaringan Perpipaan	Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah
				(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	Rumah	Rumah	Rumah	Rumah
13	Bukittinggi	20.061	2.802	7.768	9.491	17.259	13,97	38,72	47,31	86,03
14	Padang	232.533	9.790	167.354	55.389	222.743	4,21	71,97	23,82	95,79
15	Padang Panjang	13.407	148	9.894	3.365	13.259	1,1	73,8	25,1	98,9
16	Pariaman	19.576	1.410	5.011	13.155	18.166	7,2	25,6	67,2	92,8
17	Payakumbuh	33.465	268	28.746	4.451	33.197	0,8	85,9	13,3	99,2
18	Sawahlunto	14.300	1.559	7.765	4.976	12.741	10,9	54,3	34,8	89,1
19	Kota Solok	19.576	385	16.953	2.238	19.191	1,97	86,6	11,43	98,03
Provinsi Sumatera Barat		1.248.805	202.546	564.880	481.379	1.046.259	16,22%	45,23%	38,55%	83,78%

Sumber Data PDAM dan Pamsimas Kabupaten/Kota

Berdasarkan Rekapitulasi Analisa Data Cakupan Akses Penyediaan Layanan Air Minum dan Daerah Rawan Air Per kab/kota di Sumatera Barat sampai tahun 2022, dapat dihitung Akses Air Minum Layak pada Tahun 2022 secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Akses Air Minum Layak} &= \frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses penyediaan air minum aman pada 19 kab/kota}}{\text{Jumlah rumah keseluruhan}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.046.259}{1.248.805} \times 100\% \\
 \text{Akses Air Minum Layak} &= 83,78 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja yang dapat dicapai pada tahun 2022 untuk Akses Air Minum Layak ialah sebesar 83,78%.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Akses Air Minum Layak Tahun 2022

Dari hasil perhitungan realisasi yang dapat dicapai pada tahun 2022 untuk Akses Air Minum Layak, kemudian dapat dihitung capaian kinerjanya dengan cara membandingkan nilai realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi tahun berjalan (82% untuk tahun 2022). Perhitungan nilai capaian kinerja secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{83,78\%}{82\%} \times 100\% \\
 \% \text{ Capaian Kinerja} &= 102,17 \%
 \end{aligned}$$

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Indikator Akses Air Minum Layak Layak di Sumatera Barat Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak	Akses Air Minum Layak	82%	83,78%	102,17%

Dengan pencapaian target sebesar 102,17%, maka klasifikasi penilaian untuk Akses Air Minum Layak dapat diindikasikan sebagai **Sangat Baik**.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Akses Air Minum Layak dengan Tahun Lalu

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian Akses Air Minum Layak pada tahun 2020, 2021 & 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Rasio Kemantapan Jalan tahun 2020, 2021 dan 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Akses Air Minum Layak	80	81	82	80,04	82,26	83,78	100,05	101,56	102,17

Sumber data : LAKIP

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi persentase (%) Akses Air Minum Layak dari tahun 2020, 2021 dan 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian pada peningkatan air minum layak pada Provinsi Sumatera setiap tahunnya berhasil mencapai lebih dari 100%. Adapun capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor, baik kinerja dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Akses Air Minum Layak dengan Target Tahun 2022 terhadap Renstra

Pada Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2021-2026 telah ditetapkan target yang perlu dicapai untuk Akses Air Minum Layak pada tahun 2022 ialah sebesar 82%. Adapun perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 yang telah dihitung sebelumnya dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Akses Air Minum Layak s/d 2022 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak	Akses Air Minum Layak	83,78%	82 %	102%

Dari tabel diketahui bahwa capaian air minum s/d Tahun 2022 telah tercapai lebih dari 100% pada akhir Renstra.

e) Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Akses Air Minum Layak

Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang bersumber dari PDAM dan Pamsimas, ditemukan bahwa Akses Air Minum Layak Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 sebesar 83.78%. Nilai tersebut lebih tinggi dari target Tahun 2022 yaitu 82%. Hal ini dikarenakan kegiatan pendukung yang menjadi kewenangan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sudah dilaksanakan dengan baik dengan realisasi pengerjaan rata-rata mencapai target 100%. Adapun beberapa faktor pendukung lainnya yang membantu dalam pencapaian target kinerja Akses Air Minum Layak ialah sebagai berikut:

- Kepedulian Kabupaten/Kota terhadap pemenuhan capaian SPM
- Mendorong Kabupaten/Kota untuk menyusun program dan perencanaan (Readiness Criteria) melalui pembinaan dan money
- Merekomendasikan kepada Kabupaten/Kota untuk meningkatkan penganggaran terhadap akses air minum skala kecil (Pamsimas)
- Berkoordinasi dengan balai BPPW untuk peningkatan Akses air minum ke Kabupaten/Kota

f) Hambatan dalam Peningkatan Kinerja Akses Air Minum Layak

Dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja Akses Air Minum Layak tentunya juga ada beberapa kendala yang dapat menjadi faktor penghambat, antara lain:

- Belum optimalnya anggaran yg tersedia di Kabupaten/Kota
- Keterbatasan ketersediaan sumber air baku di Kabupaten/Kota
- Di beberapa Kabupaten/Kota masih terkendala pembebasan lahan
- Masih banyak nya desa yang tidak dapat terjangkau oleh pelayanan PDAM

g) Upaya/Tindak Lanjut yang dilakukan untuk Peningkatan Kinerja Akses Air Minum Layak

Upaya yang dapat dilakukan untuk semakin meningkatkan Cakupan Air Minum Layak dimasa yang akan datang antara lain:

- Sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi dalam cakupan layanan air minum, maka pemerintah provinsi mendorong pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan maupun pengembangan dalam pelayanan air minum untuk masyarakat yang belum terlayani.

- Sesuai dengan kewenangan provinsi bahwa untuk pelayanan air minum yang berskala regional, sehingga pemerintah provinsi mencoba mendorong Kabupaten/Kota yang mempunyai keterbatasan sumber air baku untuk melakukan MOU dalam pengelolaan air minum regional yang nantinya dapat melayani ketersediaan air curah untuk Kabupaten/Kota.

h) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang)

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran/target indikator kinerja Akses Air Minum layak yang ada di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sudah sangat sesuai, yaitu Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mendukung realisasi kinerja tersebut adalah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota.

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan, pastinya membutuhkan program dan kegiatan yang mendukung. Untuk percepatan dan efisiensi yang dilakukan pada program pendukung pencapaian indikator ini antara lain :

- Ketersediaan pagu anggaran awal program pendukung pencapaian indikator kinerja cakupan air minum
- Pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk lebih jelasnya penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan program/kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.21 Realiasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Capaian Akses Air Minum Layak

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (%)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.660.337.809,00	1.563.785.466,80	94,18
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota	1.660.337.809,00	1.563.785.466,80	94,18
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.097.337.400,00	1.059.694.336,80	96,57
Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	174.625.843,00	152.411.915,00	87,28

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (%)
Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	388.374.566,00	351.679.215,00	90,55

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa untuk tahun 2022 Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat Telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.660.337.809,00, yang mana dapat direalisasikan sebesar 94,18% untuk mendukung peningkatan cakupan air minum layak. Dalam hal ini, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat lebih banyak berperan dalam hal pelayanan Cakupan Air Minum yang bersifat regional. Pada prinsipnya instansi terkait yang ada di kabupaten/kota yang memiliki peran utama dalam memberikan pelayanan air minum di daerah.

3.3.5. Sasaran 5: Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak

a) Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Indikator Akses Sanitasi Layak

Untuk sasaran selanjutnya yang perlu dipenuhi oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat ialah Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak dengan indikator kinerja yang perlu dicapai yaitu Akses Sanitasi Layak. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/ Sistem Terpusat. Ini berarti bahwa sanitasi merupakan upaya untuk menjaga kebersihan. Maka dari itu peran pemerintah sangat besar terhadap sanitasi/akses sanitasi layak karena pemerintah harus mengubah perilaku yang sengaja atau kebiasaan hidup yang tidak sehat seperti membuang sampah sembarangan serta pembuangan air limbah.

Sama halnya dengan air minum, cakupan sanitasi merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target *Universal Access Nasional*. Berdasarkan data yang ada pada Bidang Cipta Karya, diketahui bahwa untuk mencapai target pemenuhan rumah tangga bersanitasi dianalisis dari data akses jamban yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Adapun untuk rincian data tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.22 Laporan Kemajuan Akses Jamban Provinsi Sumatera Barat s/d Desember 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah	TIDAK AKSES		AKSES			JUMLAH		PERSENTASE		
			BABS	CUBLUK PERKOTAAN	DASAR (CUBLUK PERDESAAN)	SPALDS	SPALDS AMAN	SPALD-T AMAN	TIDAK AKSES	AKSES	TIDAK AKSES	AKSES
			(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(%)	(%)
1	Agam	116.418	16.531	10.505	20.955	65.191	0	3.236	27.036	89.382	23,22%	76,78%
2	Dharmasraya	58.526	0	2.275	1.329	51.715	2.511	696	2.275	56.251	3,89%	96,11%
3	Kepulauan Mentawai	13.934	5.615	278	729	7.312	0	0	5.893	8.041	42,29%	57,71%
4	Lima Puluh Kota	61.126	9.964	3.132	18.460	28.164	0	1.406	13.096	48.030	21,42%	78,58%
5	Padang Pariaman	92.129	9.489	6.495	41.458	31.702	1.106	1.879	15.984	76.145	17,35%	82,65%
6	Pasaman	59.970	16.732	4.453	26.986	11.679	0	120	21.185	38.785	35,33%	64,67%
7	Pasaman Barat	93.567	14.222	5.528	10.526	63.291	0	0	19.750	73.817	21,11%	78,89%
8	Pesisir Selatan	107.610	0	12.993	38.589	45.332	8.307	2.389	12.993	94.617	12,07%	87,93%
9	Sijunjung	56.324	0	7.507	24.360	24.457	0	0	7.507	48.817	13,33%	86,67%
10	Kabupaten Solok	118.956	7.494	12.412	10.575	33.196	54.589	690	19.906	99.050	16,73%	83,27%
11	Solok Selatan	38.140	5.263	4.573	19.539	8.284	0	481	9.836	28.304	25,79%	74,21%
12	Tanah Datar	79.187	6.573	11.631	33.496	27.487	0	0	18.204	60.983	22,99%	77,01%
13	Bukittinggi	20.061	0	1.395	0	17.543	1.123	0	1.395	18.666	6,95%	93,05%
14	Padang	232.533	0	29.125	5.255	166.459	29.648	2.046	29.125	203.408	12,53%	87,47%
15	Padang Panjang	13.407	0	874	0	10.884	1.649	0	874	12.533	6,52%	93,48%
16	Pariaman	19.576	0	2.714	2.427	12.233	162	2.040	2.714	16.862	13,86%	86,14%
17	Payakumbuh	33.465	0	1.376	773	22.883	8.433	0	1.376	32.089	4,11%	95,89%
18	Sawahlunto	14.300	0	1.503	602	11.737	458	0	1.503	12.797	10,51%	89,49%
19	Kota Solok	19.576	0	640	799	17.953	49	135	640	18.936	3,27%	96,73%
Provinsi Sumatera Barat		1.248.805	91.883	119.409	256.858	657.502	108.035	15.118	211.292	1.037.513	16,92%	83,08%

Berdasarkan analisa dari data Laporan Kemajuan Akses Jamban Provinsi Sumatera Barat s/d Desember 2022, dapat dihitung Akses Sanitasi Layak pada Tahun 2022 secara matematis dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Akses Air Minum Layak} &= \frac{\text{jumlah rumah yang akses sanitasi pada 19 Kab/Kota sampai tahun 2022}}{\text{Jumlah rumah keseluruhan}} \times 100\% \\ &= \frac{1.037.513}{1.248.805} \times 100\% \\ \text{Akses Air Minum Layak} &= 83,08\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja yang dapat dicapai pada tahun 2022 untuk Akses Sanitasi Layak ialah sebesar 83,08%.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Akses Sanitasi Layak Tahun 2022

Dari hasil perhitungan realisasi yang dapat dicapai pada tahun 2022 untuk Akses Sanitasi Layak, kemudian dapat dihitung capaian kinerjanya dengan cara membandingkan nilai realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi tahun berjalan (82% untuk tahun 2022). Perhitungan nilai capaian kinerja secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{83,08\%}{82\%} \times 100\% \\ \% \text{ Capaian Kinerja} &= 101,32\% \end{aligned}$$

Tabel 3.23 Target dan Capaian Indikator Akses Sanitasi Layak di Sumatera Barat Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI (%)	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak	Akses Sanitasi Layak	82%	83,08%	101,32%

Sumber data : Bidang Cipta Karya (Laporan Kemajuan Akses Jamban Provinsi Sumatera Barat)

Dengan pencapaian target sebesar 101,32%, maka klasifikasi penilaian untuk Akses Sanitasi Layak dapat diindikasikan sebagai **Sangat Baik**.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Akses Sanitasi Layak dengan Tahun Lalu

Realisasi kinerja dan capaian Akses Sanitasi Layak pada tahun 2020, 2021 & 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.24 Realisasi Kinerja & Capaian Akses Sanitasi Layak tahun 2020, 2021 & 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Akses Sanitasi Layak	79	80	82	81,68	82,05	83,08	103,39	102,56	101,32

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi persentase (%) Akses Sanitasi Layak dari tahun 2020, 2021 dan 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian pada peningkatan sanitasi layak pada Provinsi Sumatera setiap tahunnya berhasil mencapai lebih dari 100%. Adapun capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor, baik kinerja dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Akses Sanitasi Layak dengan Target s/d 2022 terhadap Renstra

Pada Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2021-2026 telah ditetapkan target yang perlu dicapai untuk Akses Sanitasi Layak pada tahun 2022 ialah sebesar 82%. Adapun perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 yang telah dihitung sebelumnya dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja Akses Sanitasi Layak s/d 2022 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak	Akses Sanitasi Layak	83,08%	82 %	101,32%

Dari tabel diketahui bahwa capaian Akses Sanitasi Layak s/d Tahun 2022 telah tercapai lebih dari 100% pada akhir Renstra.

e) Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Akses Sanitasi Layak

Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat terkait Laporan Kemajuan Akses Jamban Provinsi Sumatera Barat s/d Desember 2022, didapat dijelaskan bahwa Akses Sanitasi Layak Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 ialah sebesar 83.08%. Nilai tersebut lebih tinggi dari target Tahun 2022 yaitu 82%. Hal ini dikarenakan kegiatan pendukung yang menjadi kewenangan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sudah dilaksanakan dengan baik dengan realisasi pengerjaan rata-rata mencapai target 100%. Adapun beberapa faktor pendukung lainnya yang membantu dalam pencapaian target kinerja Akses Sanitasi Layak ialah sebagai berikut:

- Telah masuk dalam program dan kegiatan melalui pembinaan kegiatan SSK di pokja PKP Provinsi
- Memperkuat pembinaan melalui kegiatan Monev dan advokasi kepada stakeholder di Kabupaten/Kota
- Melaksanakan bimtek secara konsisten kepada kab/kota
- Memperbanyak Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan melalui kegiatan "Percepatan Pendampingan Sanitasi Permukiman" (PPSP)
- Melakukan advokasi kepada kepala daerah di Kabupaten/Kota

f) Hambatan dalam Peningkatan Kinerja Akses Sanitasi Layak

Dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja Akses Sanitasi Layak tentunya juga ada beberapa kendala yang dapat menjadi faktor penghambat, antara lain:

- Pelaksanaan kegiatan banyak berada di Kabupaten/Kota, di tingkat provinsi hanya lebih kepada pembinaan
- Sumber pembiayaan dari APBN lebih kepada operasional, rehab, optimalisasi IPLT eksisting
- Keterbatasan anggaran di Kabupaten/Kota
- Kecilnya rasio anggaran di Kabupaten/Kota untuk program sanitasi

g) Upaya/Tindak Lanjut yang dilakukan untuk Peningkatan Kinerja Akses Sanitasi Layak

Upaya yang dapat dilakukan untuk semakin meningkatkan Cakupan Sanitasi Layak di masa yang akan datang ialah dengan melakukan advokasi kepada tim anggaran legislatif tentang program strategi sanitasi.

h) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang)

Terdapat beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran/target indikator kinerja Akses Sanitasi Layak yang ada di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

- Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Untuk lebih jelasnya penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan program/kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.26 Realiasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Capaian Akses Sanitasi Layak

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENTASE KEUANGAN(%)
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	103.855.760,00	100.472.800,00	96,74
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	103.855.760,00	100.472.800,00	96,74
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	103.855.760,00	100.472.800,00	96,74
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	357.743.700,00	352.714.189,00	98,59
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	357.743.700,00	352.714.189,00	98,59
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	357.743.700,00	352.714.189,00	98,59
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.447.874.640,00	2.389.150.200,00	97,60
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	2.447.874.640,00	2.389.150.200,00	97,60
Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	2.447.874.640,00	2.389.150.200,00	97,60

Dalam memenuhi sasaran Meningkatkan Cakupan Sanitasi Layak, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat lebih banyak berperan dalam hal pelayanan Cakupan Sanitasi yang bersifat regional. Pada prinsipnya instansi terkait yang ada di Kabupaten/Kota yang memiliki peran utama dalam memberikan pelayanan sanitasi di daerah.

3.3.6. Sasaran 6: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis

Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis, terdapat 2 indikator kinerja yang perlu dicapai yaitu Persentase Bangunan Strategis Terbangun dan Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis.

3.3.6.1. Indikator Kinerja 1: Persentase Bangunan Strategis Terbangun

a) Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Indikator Persentase Bangunan Strategis Terbangun

Bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya. Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya; mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Sehingga, Bangunan strategis adalah bangunan yang kawasan, tempat, lokasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa serta merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Adapun total bangunan yang harus dibangun oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 – 2026 adalah 18 bangunan. Jumlah bangunan yang telah dibangun sampai dengan tahun 2022 berjumlah 1 (satu) bangunan. Sehingga Persentase Bangunan Strategis Terbangun dapat dihitung secara matematis dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Persentase Bangunan Strategis Terbangun} = \frac{\text{Jumlah Bangunan Gedung Terbangun}}{\text{Total Bangunan}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{18} \times 100\%$$

Persentase
Bangunan Strategis = 6 %

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja yang dapat dicapai pada tahun 2022 untuk Persentase Bangunan Strategis Terbangun ialah sebesar 6%.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Bangunan Strategis Terbangun Tahun 2022

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan target yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022. Untuk menghitung perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat diukur dengan rumus :

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{6\%}{40,22\%} \times 100\% \\ \% \text{ Capaian Kinerja} &= 14,92\% \end{aligned}$$

Tabel 3.27 Target dan Capaian Indikator Persentase Bangunan Strategis Terbangun di Sumatera Barat Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI (%)	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	Persentase Bangunan Strategis Terbangun	40.22%	6%	14,92%

Sumber data : Bidang Cipta Karya

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian yang diperoleh untuk indikator kinerja Persentase Bangunan Strategis Terbangun pada tahun 2022 adalah sebesar 14,92%. Dengan pencapaian target sebesar 14,92%, maka klasifikasi penilaian untuk Persentase Bangunan Strategis Terbangun dapat diindikasikan sebagai **Kurang**.

Walaupun realisasi kinerja untuk Persentase Bangunan Strategis Terbangun masih terindikasi “Kurang”, namun ada beberapa faktor pendorong yang mendukung tercapainya realisasi sebesar 6% untuk Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis, yaitu:

- Telah tersedianya dokumen perencanaan Bangunan Gedung, seperti DED, Dokumen Lingkungan (DokLing), dan FS); dan
- Telah tersedianya lokasi lahan.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Persentase Bangunan Strategis Terbangun dengan Tahun Lalu

Perbandingan realisasi kinerja & capaian dengan Tahun Lalu dilakukan untuk menunjukkan capaian yang telah diraih dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Hal tersebut bertujuan untuk memperlihatkan kenaikan atau penurunan capaian. Realisasi kinerja dan capaian Persentase Bangunan Strategis Terbangun pada tahun 2020, 2021 & 2022 dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.28 Realisasi Kinerja & Capaian Presentase Bangunan Strategis Terbangun tahun 2020, 2021 dan 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Persentase Bangunan Strategis Terbangun	-	-	40,22	-	-	6	-	-	14,92

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa indikator kinerja Persentase Bangunan Strategis Terbangun baru ada pada tahun 2022. Dengan target kinerja sebesar 40,22%, realisasi kinerja yang dapat dicapai ialah sebesar 6% dan capaian kinerja sebesar 14,92%.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Bangunan Strategis Terbangun dengan Target s/d 2022 terhadap Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dapat diukur dengan cara menghitung persentase capaian, yaitu membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan dikali 100%.

Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Bangunan Strategis Terbangun s/d 2022 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET s/d 2022	REALISASI s/d 2022	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	Persentase Bangunan Strategis Terbangun	40,22 %	6 %	14,92%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa indikator kinerja Persentase Bangunan Strategis Terbangun pada tahun 2022 memiliki target sebesar 40,22% dengan realisasi kinerja sebesar 6%, sehingga memiliki persentase capaian sebesar 14,92%. Nilai capaian ini tidak dapat mencapai target 100% pada akhir Renstra.

e) Hambatan dalam Peningkatan Kinerja Persentase Bangunan Strategis Terbangun

Sesuai dengan dokumen RPJMD Sumatera Barat, target yang harus tercapai pada tahun 2022 sebesar 40.22%. Dengan realisasi sebesar 6%, maka dapat disimpulkan bahwa target yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai. Adapun beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat tidak tercapainya target kinerja dari Persentase Bangunan Strategis Terbangun, antara lain:

- Belum ada ketentuan mendasar mengenai bangunan strategis;
- Persentase Bangunan Strategis terbangun dihitung berdasarkan jumlah bangunan strategis terbangun, bangunan strategis Provinsi Sumatera Barat berjumlah 18 untuk menyelesaikan pembangunan tersebut diperlukan dana yang cukup besar;
- Persentase Bangunan Strategis terbangun dihitung berdasarkan kondisi bangunan 100 % terbangun, sedangkan penganggaran yang dilakukan/disetujui tidak dalam kondisi 100 % dibangun (dibangun bertahap);
- Kegiatan/ Pekerjaan yang dianggarkan di DPA kurang sesuai dengan rencana penganggaran Penyelesaian Bangunan Strategis;
- Tertundanya proses pengadaan sehingga pekerjaan dimulai mendekati akhir tahun; dan
- Kurangnya Kemampuan Fiskal Provinsi.

f) Upaya/Tindak Lanjut yang dilakukan untuk Peningkatan Kinerja Persentase Bangunan Strategis Terbangun

Dengan tidak tercapainya target kinerja untuk Persentase Bangunan Strategis Terbangun dengan target yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026, adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat ialah sebagai berikut:

- Mengupayakan Penganggaran bangun Gedung dilakukan dalam 1 kali penganggaran bukan dengan cara bertahap;
- Menyesuaikan alokasi pendanaan dengan rencana penyelesaian Bangunan Gedung;
- Untuk menutup timpangnya usulan dengan alokasi dana Pemprov Sumbar perlu untuk mengoptimalkan pengusulan pola pendanaan-pendanaan lainnya.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang)

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan, pastinya membutuhkan program dan kegiatan yang mendukung. Dalam mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis didukung oleh Program Penataan Bangunan Gedung, dengan kegiatan pendukungnya yaitu Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi. Untuk lebih jelasnya penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan program/kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.30 Realiasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Capaian Persentase Bangunan Strategis Terbangun

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE KEUANGAN(%)
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	46.996.074.573,00	44.099.506.426,88	93,84
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	46.996.074.573,00	44.099.506.426,88	93,84
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	46.041.730.614,00	43.158.759.807,88	93,74
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	520.000.000,00	513.773.500,00	98,80

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE KEUANGAN(%)
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	125.375.758,00	124.056.027,00	98,95
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi (UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung)	233.159.818,00	227.380.522,00	97,52
Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	75.808.383,00	75.536.570,00	99,64

Pada tahun 2022, Program Penataan Bangunan Gedung mendapatkan alokasi anggaran berjumlah Rp 46.996.074.573, dengan realisasi keuangan ialah sebesar Rp 44.099.506.426,88. Dengan terserapnya pagu anggaran sebesar 93,84% pada tahun 2022, akan tetapi masih menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja disebabkan pelaksanaan kegiatan fisik pada Program Penataan Bangunan Gedung masih dilakukan secara bertahap sesuai dengan pagu dana yang diberikan kepada Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.

3.3.6.2. Indikator Kinerja 2: Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis

a) Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Indikator Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis

Kawasan strategis merupakan kawasan, tempat, lokasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa serta merupakan sumber pendanaan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kawasan strategis yang menjadi kewenangan dalam pelaksanaan program/kegiatan oleh Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat yaitu Gunung Talang Bukit Cambai, Masjid Raya, Museum PDRI, Kawasan Budaya, Museum dan IPTEK, dan RTH (Perbatasan Sumbar-Riau di Kabupaten 50 Kota, Perbatasan Sumbar-Jambi di Kabupaten Dharmasraya, Perbatasan Sumbar-Sumut di Kabupaten Pasaman, Perbatasan Sumbar-Bengkulu di Kabupaten Pesisir Selatan, Perbatasan Sumbar-Jambi di Kabupaten Pesisir Selatan, Perbatasan Sumbar-Jambi di Kabupaten Solok Selatan, Perbatasan Sumbar-Riau di Kabupaten Sijunjung, dan Perbatasan Sumbar-Sumut di Kabupaten Pasaman Barat).

Di dalam penyusunan dokumen RPJMD 2021-2026, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai target Kawasan Strategis dengan menargetkan capaian sebesar 20% pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, kawasan strategis yang telah dilakukan penataan oleh Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat ialah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau di Kab. 50 Kota, sehingga Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis dapat dihitung secara matematis dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Penataan} & & \text{Jumlah kawasan strategis yang ditata} \\
 \text{Bangunan pada} & = & \frac{\text{bangunan dan lingkungannya}}{\text{Jumlah total kawasan strategis}} \times 100\% \\
 \text{Kawasan Strategis} & & \\
 & = & \frac{1}{40} \times 100\% \\
 \\
 \text{Persentase Penataan} & & \\
 \text{Bangunan pada} & = & 2,5\% \\
 \text{Kawasan Strategis} & &
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja yang dapat dicapai pada tahun 2022 untuk Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis Terbangun ialah sebesar 2,5%.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis Tahun 2022

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan target yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022. Untuk menghitung perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat diukur dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Capaian Kinerja} & = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 & = \frac{2,5\%}{20\%} \times 100\% \\
 \% \text{ Capaian Kinerja} & = 12,5\%
 \end{aligned}$$

Tabel 3.31 Target dan Capaian Indikator Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis di Sumatera Barat Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI (%)	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis	20%	2.5%	12,5%

Sumber data : Bidang Cipta Karya

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat capaian realisasi kinerja Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis pada Tahun 2022 adalah sebesar 12,5%. Dengan pencapaian target sebesar 12,5%, maka klasifikasi penilaian untuk Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis dapat diindikasikan sebagai **Kurang**. Dalam pelaksanaannya, untuk mencapai target kinerja dari Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis pada tahun 2022 ini, telah didukung dengan menyiapkan dokumen perencanaan Bangunan Gedung (Masterplan, DED, Dokling, dan FS) sehingga dapat terealisasikan sebesar 2,5%.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Persentase Bangunan Strategis Terbangun dengan Tahun Lalu

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis pada tahun 2020,2021 & 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.32 Realisasi Kinerja & Capaian Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis tahun 2020, 2021 dan 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis	-	-	20	-	-	2.5	-	-	12,5

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja dari Presentase Bangunan Terbangun baru ada pada tahun 2022. Dengan target kinerja sebesar 20%, realisasi kinerja yang dapat dicapai ialah sebesar 2,5% dan capaian kinerja sebesar 12,5%..

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis dengan Target Tahun s/d 2022 terhadap Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target jangka yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis s/d 2022 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET s/d 2022	REALISASI s/d 2022	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis	20 %	2.5 %	12,5%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa indikator kinerja Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis pada tahun 2022 memiliki target sebesar 20% dengan realisasi kinerja sebesar 2,5%, sehingga memiliki persentase capaian sebesar 12,5%. Nilai capaian ini tidak dapat mencapai target 100% pada akhir Renstra.

e) Hambatan dalam Peningkatan Kinerja Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis

Dalam pelaksanaan tentunya juga ada beberapa kendala yang dapat menjadi faktor penghambat kenapa target kinerja untuk Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis tidak dapat tercapai. Adapun beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat tersebut antara lain:

- Belum ada SK penetapan Kawasan Strategis Provinsi Bidang Cipta Karya, sehingga belum ada ketentuan mendasar mengenai Kawasan Strategis
- Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis terdiri dari 5 kawasan yaitu: 1) Kawasan Gunung Talang Bukit Cambai, 2) Kawasan Masjid Raya, 3) Kawasan RTH (8 lokasi), 4) Kawasan Museum PDRI, 5) Kawasan Budaya, Museum dan IPTEK. Untuk menyelesaikan penataan tersebut mengahdapai kednaala dimana diperlukan alokasi dana yang cukup besar untuk melakukan penataan pada semua kawasan tersebut.
- Kurangnya Kemampuan Fiskal Provinsi sehingga anggaran yang di setuju tidak sesuai dengan rencana penyelesaian Penataan Bangunan Kawasan Strategis

- Belum optimalnya anggaran yang tersedia di kabupaten/kota untuk mendukung penataan kawasan yang ada di wilayah kewenangan Kabupaten/Kota tersebut.

f) Upaya/Tindak Lanjut yang dilakukan untuk Peningkatan Kinerja Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis

Dengan tidak tercapainya target kinerja untuk Persentase Bangunan Strategis Terbangun dengan target yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026, adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat ialah sebagai berikut:

- Menyesuaikan alokasi pendanaan dengan rencana penyelesaian Penataan Bangunan Gedung pada Kawasan Strategis
- Merancang/mengajukan bersama dengan OPD terkait mengenai ketentuan yang menjadi dasar penentuan Kawasan Strategis

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang)

Pencapaian Target Indikator Kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan, pastinya membutuhkan program dan kegiatan yang mendukung. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja untuk Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis yang ada di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.34 Realiasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Capaian Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE KEUANGAN (%)
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.604.917.554,00	1.490.937.966,00	92,90
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.604.917.554,00	1.490.937.966,00	92,90
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	148.478.499,00	104.037.871,00	70,07
Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	97.331.352,00	86.188.000,00	88,55
Penataan Bangunan dan Lingkungan	546.089.189,00	536.733.952,00	98,29

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE KEUANGAN (%)
Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota (UPTD Pengawasan dan Pengendalian bangunan dan Gedung)	581.880.814,00	538.365.147,00	92,52
Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	231.137.700,00	225.612.996,00	97,61

Dalam mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis dengan indikator kinerja Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis, didukung oleh Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, dengan kegiatan pendukungnya yaitu Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Adapun pada tahun 2022, Program ini mendapatkan alokasi anggaran berjumlah Rp 1.604.917.554,00, dengan realisasi keuangan ialah sebesar Rp 1.490.937.966,00. Dengan terserapnya pagu anggaran sebesar 92,90% pada tahun 2022, akan tetapi masih menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja disebabkan pelaksanaan kegiatan fisik pada program/kegiatan pendukung ini masih dilakukan secara bertahap sesuai dengan pagu dana yang dianggarkan.

3.3.7 Sasaran Mewujudkan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan

a) Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Indikator Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi

Indikator dalam Mewujudkan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan adalah terkait capaian persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi Sumatera Barat. Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi dapat ditentukan dengan membandingkan aspek muatan RPJMD tahun berjalan dengan muatan program RTRW, seperti Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik daerah sesuai dengan rancangan pengembangan pola ruang pada sektor unggulan/potensi daerah; Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik daerah sesuai dengan rancangan pengembangan struktur ruang mendukung pertumbuhan sektor unggulan/potensi daerah; dan Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan kawasan strategis nasional dan daerah (fokus pada pengembangan kawasan strategis yang mendukung ekonomi, sosial budaya, daya tampung dan daya dukung lingkungan, dan sebagainya).

Terkait Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.35 Daftar Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Provinsi T.A 2022

Daftar Bangunan Gedung yang Terbangun sampai dengan Tahun 2022	INDIKATOR KINERJA				TARGET		REALISASI (88+84):2 = 86 %
	PROGRAM RTRW PROVINSI 2012-2032	PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN (RPJM) 2017-2021	KESESUAIAN PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RTRW (9+16=25)	JUMLAH PROGRAM RPJM YANG SESUAI DENGAN RTRW (8+13=21)	
I	<i>Program Perwujudan Pengembangan Struktur Ruang</i>				9	8	88%
A	<i>Program Perwujudan Pusat Kegiatan di Provinsi Sumatera Barat</i>				6	5	
1	Pemantapan Fungsi Kota PKN	Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	Sesuai	Dinas Perhubungan	1	1	
2	Pemantapan Fungsi Kota PKW	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	
3	Pengembangan dan Penataan PKN	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	
4	Pengembangan PKW dan PKWp	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Sesuai	Dinas Kesehatan	1	1	
5	Pengembangan PKL	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	
6	Penyusunan Renstra				1		
B	<i>Program Perwujudan Sistem Prasarana</i>				3	3	

1	Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi	Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	
2	Perwujudan Sistem Prasarana Sumberdaya Air dan Irigasi	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Sesuai	Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air	1	1	
3	Prasarana Perumahan dan Permukiman	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	
II	Program Perwujudan Pola Ruang				16	13,5	84%
A	Program Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung				4	3,5	
1	Pengembangan Kawasan Hutan	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Sesuai	Dinas Kehutanan	1	1	
2	Pemantapan Kawasan Lindung	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Sesuai	Dinas Kehutanan	1	1	
3	Evaluasi Kebijakan Pemanfaatan Kawasan Lindung	Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	Kurang sesuai (hanya program pemanfaatan belum didukung evaluasi pemanfaatan untuk kelestarian kawasan lindung)	Dinas Kehutanan	1	0,5	
4	Kawasan Rawan Bencana Alam	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Sesuai	BPBD	1	1	
B	Program Perwujudan Pemantapan Kawasan Budidaya				10	8	
1	Pengembangan kawasan permukiman				1		

	- pengembangan kawasan permukiman perdesaan						
	- pengembangan kawasan permukiman perkotaan	Pengembangan perumahan	Sesuai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		1	
2	Pengembangan Kawasan Pertanian	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Pertanian	Sesuai	Dinas Pertanian	1	1	
3	Pengembangan Perkebunan	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Perkebunan	Sesuai	Dinas Perkebunan	1	1	
4	Pengembangan Kawasan Peternakan	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Peternakan	Sesuai	Dinas Peternakan	1	1	
5	Program Pengembangan Perikanan dan Kelautan	Rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	Sesuai	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	1	
6	Program Pengembangan Kawasan Pertambangan	Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Sesuai	Dinas ESDM	1	1	
7	Program Pengembangan Industri	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Sesuai	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	1	
8	Program Pengembangan Pariwisata	Program pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata	Sesuai	Dinas Pariwisata	1	1	
9	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Peruntukan Lainnya				1		
10	Penyusunan SPM				1		
C	<i>Program Perwujudan</i>				2	2	

	<i>Kawasan Strategis</i>						
1	Penyusunan RTR Kawasan Strategis	Perencanaan penataan ruang	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	
2	Penyusunan Zoning Regulation Kawasan Strategis	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	

Dari tabel di atas, dapat dihitung nilai persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi dengan cara membandingkan data pada kolom Target yaitu Jumlah Program RTRW dan Jumlah Program RPJM Yang Sesuai Dengan RTRW, yang mana dapat dihitung secara matematis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{\% Kesesuaian Program} \\ \text{Rencana Pembangunan} \\ \text{dengan Program RTRW} \\ \text{Provinsi} &= \frac{\text{Jumlah implementasi program} \\ \text{RPJMD yang sesuai dengan RTRW}}{\text{Jumlah indikasi program RTRW}} \times 100\% \\ &= \frac{21}{25} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{\% Kesesuaian Program} \\ \text{Rencana Pembangunan} \\ \text{dengan Program RTRW} \\ \text{Provinsi} &= 86\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja yang dapat dicapai pada tahun 2022 untuk Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi ialah sebesar 86%.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi Tahun 2022

Dari hasil perhitungan realisasi yang dapat dicapai pada tahun 2022 untuk Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi di atas, kemudian dapat dihitung capaian kinerjanya dengan cara membandingkan nilai realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi tahun berjalan (86% untuk tahun 2022). Perhitungan nilai capaian kinerja secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{\% Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{86\%}{86\%} \times 100\% \end{aligned}$$

% Capaian Kinerja = 100 %

Tabel 3.36 Capaian Kinerja Indikator Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	86%	86%	100%

Dengan pencapaian target sebesar 100,00%, maka klasifikasi penilaian untuk persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi adalah **Sangat Baik**.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi dengan Tahun Lalu

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi pada tahun 2020, 2021 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan Rencana Tata Ruang tahun 2020, 2021 dan 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	84	86	86	84	86	86	100,00	100,00	100,00

Sumber data : LAKIP

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi dari tahun 2020 s/d 2022 berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi dengan Target s/d 2022 terhadap Renstra

Pada Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2021-2026 telah ditetapkan target yang perlu dicapai untuk Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi pada tahun 2022 ialah sebesar 86%. Adapun perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 yang telah dihitung sebelumnya dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi s/d 2022 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI s/d 2022	TARGET s/d 2022	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	86%	86%	100,00%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi ialah sebesar 100,00% dari target Akhir Periode Renstra.

e) Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi

Dengan tercapainya target kesesuaian program antara rencana pembangunan, dalam hal ini mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRW), dapat dijelaskan bahwa keberhasilan peningkatan kinerja tersebut dapat dicapai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun dengan baik sesuai dengan arahan dari Bappenas, yakni penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus terintegrasi dengan dokumen rencana Tata Ruang, sehingga terdapat sinkronisasi program di antara kedua dokumen perencanaan. Adapun fungsi Rencana Tata Ruang adalah sebagai kerangka pembangunan, dimana program pembangunan harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan.

Disamping itu, dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan pembangunan maupun dokumen rencana tata ruang, dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari pihak perangkat daerah (OPD) selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatif.

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang)

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran/target indikator kinerja Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi yang ada di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sudah sangat sesuai, yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mendukung realisasi kinerja tersebut adalah Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi. Untuk lebih jelasnya penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan program/kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.39 Realiasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Capaian Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE KEUANGAN(%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.268.907.276,00	2.645.179.253,00	80,92
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	993.313.098,00	796.192.135,00	80,16
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	815.348.869,00	630.190.791,00	77,29
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	177.964.229,00	166.001.344,00	93,28
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.065.423.581,00	874.332.862,00	82,06
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	634.399.699,00	525.169.554,00	82,78

Untuk pencapaian target kinerja indikator ini, Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan pagu dana sekitar Rp. 3.268.907.276,00 yang mana melalui Bidang Tata Ruang telah mampu melaksanakan program/kegiatan dengan serapan dana sebesar 2.645.179.253,00 atau 80,92% dari alokasi anggaran yang diberikan.

3.4. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan, membutuhkan program dan kegiatan serta pagu anggaran yang mendukung. Adapun program dan kegiatan serta rincian pagu anggaran yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja yang ada di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.40 Realisasi Anggaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENTAS E REALISASI (%)	KINERJA KEUANGAN	PRESENTASE FISIK (%)	KINERJA FISIK
MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI	NILAI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	41.073.846.990,00	40.267.645.602,00	98,04	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ORGANISASI	TINGKAT KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN ORGANISASI							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	385.190.280,00	361.140.776,00	93,76	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	111.513.360,00	106.330.490,00	95,35	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	7.228.500,00	6.444.450,00	89,15	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	8.063.500,00	5.751.400,00	71,33	Baik	100,00	Sangat Baik
		Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	10.000.000,00	9.972.325,00	99,72	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENTAS E REALISASI (%)	KINERJA KEUANGAN	PRESENTASE FISIK (%)	KINERJA FISIK
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	20.000.000,00	18.647.400,00	93,24	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.739.500,00	45.405.735,00	91,29	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	178.645.420,00	168.588.976,00	94,37	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.873.868.765,00	30.338.865.249,00	98,27	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.626.284.099,00	29.105.465.470,00	98,24	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.247.584.666,00	1.233.399.779,00	98,86	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	245.788.500,00	232.416.583,00	94,56	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	245.788.500,00	232.416.583,00	94,56	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	360.908.250,00	325.092.228,00	90,08	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	264.000.000,00	237.749.000,00	90,06	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	96.908.250,00	87.343.228,00	90,13	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.176.907.963,00	1.166.226.525,00	99,09	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENTAS E REALISASI (%)	KINERJA KEUANGAN	PRESENTASE FISIK (%)	KINERJA FISIK
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000,00	38.885.580,00	97,21	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.000.000,00	129.921.402,00	99,94	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	149.971.000,00	149.533.229,00	99,71	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.560.000,00	26.400.000,00	99,40	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	742.706.401,00	736.104.992,00	99,11	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	87.670.562,00	85.381.322,00	97,39	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	534.628.531,00	472.067.084,00	88,30	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Pengadaan Mebel	216.832.650,00	180.523.344,00	83,25	<i>Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	317.795.881,00	291.543.740,00	91,74	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.716.787.300,00	4.653.221.618,00	98,65	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.485.000,00	10.922.000,00	95,10	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.669.178.100,00	1.627.800.663,00	97,52	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.036.124.200,00	3.014.498.955,00	99,29	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENTAS E REALISASI (%)	KINERJA KEUANGAN	PRESENTASE FISIK (%)	KINERJA FISIK
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.779.767.401,00	2.718.615.539,00	97,80	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	681.200.000,00	680.457.966,00	99,89	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	128.337.500,00	103.538.650,00	80,68	<i>Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.970.229.901,00	1.934.618.923,00	98,19	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
MENINGKATNYA CAKUPAN AIR MINUM	PRESENTASE CAKUPAN AIR MINUM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.660.337.809,00	1.563.785.466,80	94,18	<i>Sangat Baik</i>	95,02	<i>Sangat Baik</i>
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota	1.660.337.809,00	1.563.785.466,80	94,18	<i>Sangat Baik</i>	95,02	<i>Sangat Baik</i>
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.097.337.400,00	1.059.694.336,80	96,57	<i>Sangat Baik</i>	99,07	<i>Sangat Baik</i>
		Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	174.625.843,00	152.411.915,00	87,28	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	388.374.566,00	351.679.215,00	90,55	<i>Sangat Baik</i>	86,00	<i>Sangat Baik</i>
MENINGKATNYA CAKUPAN SANITASI LAYAK	AKSES SANITASI LAYAK	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	103.855.760,00	100.472.800,00	96,74	<i>Sangat Baik</i>	96,88	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENTAS E REALISASI (%)	KINERJA KEUANGAN	PRESENTASE FISIK (%)	KINERJA FISIK
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	103.855.760,00	100.472.800,00	96,74	<i>Sangat Baik</i>	96,88	<i>Sangat Baik</i>
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	103.855.760,00	100.472.800,00	96,74	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	357.743.700,00	352.714.189,00	98,59	<i>Sangat Baik</i>	98,25	<i>Sangat Baik</i>
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	357.743.700,00	352.714.189,00	98,59	<i>Sangat Baik</i>	98,25	<i>Sangat Baik</i>
		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	357.743.700,00	352.714.189,00	98,59	<i>Sangat Baik</i>	98,25	<i>Sangat Baik</i>
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.447.874.640,00	2.389.150.200,00	97,60	<i>Sangat Baik</i>	98,56	<i>Sangat Baik</i>
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	2.447.874.640,00	2.389.150.200,00	97,60	<i>Sangat Baik</i>	98,56	<i>Sangat Baik</i>
		Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	2.447.874.640,00	2.389.150.200,00	97,60	<i>Sangat Baik</i>	98,56	<i>Sangat Baik</i>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENTAS E REALISASI (%)	KINERJA KEUANGAN	PRESENTASE FISIK (%)	KINERJA FISIK
MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS BANGUNAN GEDUNG STRATEGIS	PRESENTASE BANGUNAN STRATEGIS TERBANGUN	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	46.996.074.573,00	44.099.506.426,88	93,84	Sangat Baik	98,68	Sangat Baik
		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	46.996.074.573,00	44.099.506.426,88	93,84	Sangat Baik	98,68	Sangat Baik
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	46.041.730.614,00	43.158.759.807,88	93,74	Sangat Baik	95,25	Sangat Baik
		Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	520.000.000,00	513.773.500,00	98,80	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik
		Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	125.375.758,00	124.056.027,00	98,95	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik
		Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi (UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung)	233.159.818,00	227.380.522,00	97,52	Sangat Baik	98,14	Sangat Baik
		Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	75.808.383,00	75.536.570,00	99,64	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENTAS E REALISASI (%)	KINERJA KEUANGAN	PRESENTASE FISIK (%)	KINERJA FISIK
MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS BANGUNAN GEDUNG STRATEGIS	PRESENTASE PENTAAN BANGUNAN PADA KAWASAN STRATEGIS	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.604.917.554,00	1.490.937.966,00	92,90	Sangat Baik	98,27	Sangat Baik
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.604.917.554,00	1.490.937.966,00	92,90	Sangat Baik	98,27	Sangat Baik
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	148.478.499,00	104.037.871,00	70,07	Cukup	100,00	
		Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	97.331.352,00	86.188.000,00	88,55	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik
		Penataan Bangunan dan Lingkungan	546.089.189,00	536.733.952,00	98,29	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik
		Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota (UPTD Pengawasan dan Pengendalian bangunan dan Gedung)	581.880.814,00	538.365.147,00	92,52	Sangat Baik	98,60	Sangat Baik
		Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	231.137.700,00	225.612.996,00	97,61	Sangat Baik	95,00	Sangat Baik

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENTAS E REALISASI (%)	KINERJA KEUANGAN	PRESENTASE FISIK (%)	KINERJA FISIK
MENINGKATNYA KEMANTAPAN JALAN	RASIO KEMANTAPAN JALAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	272.058.925.993,00	257.012.759.145,58	94,47	Sangat Baik	95,95	Sangat Baik
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	272.058.925.993,00	257.012.759.145,58	94,47	Sangat Baik	95,95	Sangat Baik
		Penyusunan rencana, kebijakan, strategis pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis perencanaan jalan dan jembatan	3.230.127.291,00	3.208.262.529,92	99,32	Sangat Baik	98,25	Sangat Baik
		Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	8.200.000.000,00	7.667.047.397,00	93,50	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik
		Pembangunan Jalan	29.652.035.055,00	24.652.375.659,00	83,14	Baik	95,82	Sangat Baik
		Pelebaran Jalan Menuju Standar	10.752.507.835,00	10.743.437.219,88	99,92	Sangat Baik	99,30	Sangat Baik
		Pelebaran Jalan Menambah Lajur	2.493.598.273,00	982.121.611,92	39,39	Kurang	81,63	Baik
		Rekonstruksi Jalan	58.496.194.746,00	52.740.980.416,40	90,16	Sangat Baik	89,76	Sangat Baik
		Rehabilitasi Jalan	64.096.772.405,00	62.613.586.557,90	97,69	Sangat Baik	99,79	Sangat Baik
		Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I - Pasaman)	7.886.214.894,00	7.877.263.148,56	99,89	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik
		Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II - Payakumbuh)	7.796.556.380,00	7.794.849.052,00	99,98	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik
		Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III - Bukittinggi)	6.007.429.000,00	6.007.405.000,00	100,00	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik
		Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV - Solok)	5.138.523.605,00	5.137.022.946,00	99,97	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik
		Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V - Sijunjung)	5.439.158.032,00	5.439.093.070,00	100,00	Sangat Baik	99,85	Sangat Baik

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENTAS E REALISASI (%)	KINERJA KEUANGAN	PRESENTASE FISIK (%)	KINERJA FISIK
		Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI - Pariaman)	3.357.227.025,00	3.356.896.374,00	99,99	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Pemeliharaan Berkala Jalan	35.754.451.800,00	35.305.401.682,00	98,74	<i>Sangat Baik</i>	99,57	<i>Sangat Baik</i>
		Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Workshop dan Peralatan)	2.053.254.806,00	2.004.348.174,00	97,62	<i>Sangat Baik</i>	98,67	<i>Sangat Baik</i>
		Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I - Pasaman)	923.331.490,00	923.239.529,00	99,99	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II - Payakumbuh)	955.716.860,00	954.278.769,00	99,85	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III - Bukittinggi)	775.384.415,00	775.355.675,00	100,00	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV - Solok)	840.544.592,00	838.127.942,00	99,71	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V - Sijunjung)	712.062.338,00	712.024.504,00	99,99	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI - Pariaman)	812.923.808,00	811.182.804,00	99,79	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Pembangunan Jembatan	4.537.164.329,00	4.509.972.740,00	99,40	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Penggantian Jembatan	7.031.002.100,00	7.025.487.537,00	99,92	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Rehabilitasi Jembatan	473.077.713,00	455.131.072,00	96,21	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPTD Workshop dan Peralatan)	1.755.878.775,00	1.755.525.018,00	99,98	<i>Sangat Baik</i>	95,01	<i>Sangat Baik</i>
		Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat	99.114.850,00	92.586.400,00	93,41	<i>Sangat Baik</i>	65,00	<i>Cukup</i>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENTAS E REALISASI (%)	KINERJA KEUANGAN	PRESENTASE FISIK (%)	KINERJA FISIK
		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.437.671.745,00	1.330.327.200,00	92,53	<i>Sangat Baik</i>	97,21	<i>Sangat Baik</i>
		Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	77.008.604,00	41.002.956,00	53,24	<i>Kurang</i>	64,93	<i>Cukup</i>
		Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (UPTD laboratorium Bahan Konstruksi)	1.273.993.227,00	1.258.426.161,00	98,78	<i>Sangat Baik</i>	99,85	<i>Sangat Baik</i>
MEWUJUDKAN PENATAAN RUANG YANG BAIK DAN BERKELANJUTAN	PRESENTASE KESESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN DENGAN RTRW PROVINSI	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.268.907.276,00	2.645.179.253,00	80,92	<i>Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	993.313.098,00	796.192.135,00	80,16	<i>Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	815.348.869,00	630.190.791,00	77,29	<i>Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	177.964.229,00	166.001.344,00	93,28	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.065.423.581,00	874.332.862,00	82,06	<i>Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	634.399.699,00	525.169.554,00	82,78	<i>Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	128.298.182,00	73.654.168,00	57,41	<i>Cukup</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENTAS E REALISASI (%)	KINERJA KEUANGAN	PRESENTASE FISIK (%)	KINERJA FISIK
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	302.725.700,00	275.509.140,00	91,01	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	584.994.279,00	489.719.156,00	83,71	Baik	100,00	Sangat Baik
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	332.949.653,00	321.251.443,00	96,49	<i>Sangat Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Sistem Informasi Penataan Ruang	252.044.626,00	168.467.713,00	66,84	<i>Cukup</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	625.176.318,00	484.935.100,00	77,57	Baik	100,00	Sangat Baik
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	38.075.137,00	32.034.813,00	84,14	<i>Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	271.274.368,00	227.576.793,00	83,89	<i>Baik</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	86.888.187,00	49.862.641,00	57,39	<i>Cukup</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	228.938.626,00	175.460.853,00	76,64	<i>Cukup</i>	100,00	<i>Sangat Baik</i>

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 merupakan cerminan capaian target kinerja dalam rangka menunjang tercapainya sasaran strategis pada tahun selanjutnya. Laporan Kinerja disusun berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan terhadap Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan 9 program, 19 Kegiatan serta 92 Sub Kegiatan.

Penilaian kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan berdasarkan realisasi fisik maupun keuangannya. Pada laporan ini, dilakukan pengukuran capaian kinerja secara kuantitatif dan dilanjutkan dengan analisis penilaian kinerja secara kuantitatif dengan terlebih dahulu menetapkan kriteria skala kualitatif sehingga dapat diketahui kinerja program/kegiatan secara kualitatif.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada LAKIP ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: dari 9 (Sembilan) program, meliputi: 19 (Sembilan Belas) Kegiatan serta 92 (Sembilan Puluh Dua) Sub Kegiatan pada tahun 2022, dari capaian kinerja fisik diketahui bahwa ke 19 (Sembilan Belas) program terlaksana dengan kinerja sangat baik.

Penilaian Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini menjadi salah satu bahan untuk pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi sesuai Penetapan Kinerja yang ada. Kendala-kendala yang dihadapi pada Tahun 2022 dapat dijadikan cermin untukantisipasi pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan capaian keuangan diketahui bahwa kinerja Dinas BMCKTR berada pada prediket penilaian "*baik*", sementara dari capaian realisasi fisik berada pada prediket "*sangat baik*". Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Bina Marga, Cipta

Karya dan Tata Ruang dalam rangka mewujudkan capaian keuangan lebih baik di masa mendatang antara lain :

1. Mempersiapkan kelengkapan administrasi untuk persiapan Pengadaan Barang dan Jasa untuk semua paket pekerjaan terutama paket lelang agar pelaksanaan pekerjaan fisik bisa dilakukan lebih awal, sehingga tidak ada lagi paket pekerjaan yang dilaksanakan melewati Tahun Anggaran yang nantinya akan berefek pada rendahnya serapan keuangan seperti yang terjadi pada Tahun 2022 ini.
2. Menempatkan SDM yang berkualitas sesuai dengan kompetensi bidangnya masing-masing sehingga kinerja pelaksanaan kegiatan memberikan hasil yang baik.
3. Meningkatkan monitoring dan pengawasan berlapis dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.